

SKRIPSI

**EFEKTIFITAS SISTEM AKUNTANSI PENERIMAAN DAN
PEMANFAATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**

(Suatu Tinjauan Empiris Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Asset Daerah Kabupaten Jeneponto)

Oleh

ASTUTI INDRIANI

NIM : 105730441913



**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
MAKASSAR**

2017



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS
EKONOMI DAN BISNIS JURUSAN AKUNTANSI

Alamat : Jalan Sultan Alauddin No. 259 Makassar ☎ Fax (0411) 860 132 Makassar 90221

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **EFEKTIFITAS SISTEM AKUNTANSI PENERIMAAN DAN PEMANFAATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) (Suatu Tinjauan Empiris Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Asset Daerah Kabupaten Jeneponto)**

Nama : **ASTUTI INDRIANI**

NIM : **105730441913**

Jurusan : **AKUNTANSI**

Fakultas : **EKONOMI DAN BISNIS**

Perguruan Tinggi : **UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR.**

Menyatakan bahwa skripsi ini telah diperiksa dan diujikan di depan dosen penguji Skripsi Strata Satu (S1) pada hari Sabtu, 14 Oktober 2017 pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 14 Oktober 2017

Menyetujui:

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. H. Mahmud Nuhung, SE., MA.

NBM: 49 7794

Abd. Salam HB, SE., M.Si, Ak,CA.

NBM: 88553



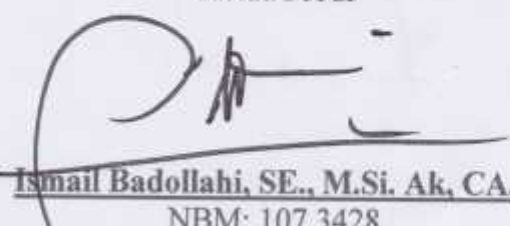
Dekan

Ismail Rasulong, SE., MM.

NBM: 903 078

Mengetahui

Ketua Prodi



Ismail Badollahi, SE., M.Si. Ak, CA.

NBM: 107 3428



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS JURUSAN AKUNTANSI

Alamat : Jalan Sultan Alauddin No. 259 Makassar *Fax (0411)860 132 Makassar 90221

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi Atas Nama Astuti Indriani, Nim 105730441913 ini Telah Diperiksa dan Diterima Oleh Panitia Ujian Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor Tahun 1439 H/2017 M dan Telah Dipertahankan Didepan Penguji Pada Hari Sabtu, 14 Oktober 2017 M. Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, Muharram 1439 H
14 Oktober 2017 M

Panitia Ujian

1. Pengawas Urutan : Dr. H. Abdul Kahmar Rahim, SE., MM
 (Rektor Unismuh Makassar) 
2. Ketua : Ismail Rasulong, SE., MM
 (Dekan Fakultas Ekonomi) 
3. Sekretaris : Drs. H. Sultan Sarda, MM
 (Wakil Dekan Fakultas Ekonomi) 
4. Penguji
 - a. Drs. H. Sultan Sarda, MM 
 - b. Ismail Badollahi, SE., M.Si., Ak, CA 
 - c. Hj. Naidah, SE., M.Si 
 - d. Muttiarni, SE., M.Si 

PERNYATAAN SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawahini,

Nama : ASTUTI INDRIANI

NIM : 105730441913

Fakultas/Jurusan :Ekonomi dan Bisnis/Akuntansi

PerguruanTinggi : Universitas Muhammadiyah Makassar

Dengan Dosen Pembimbing masing-masing :

1. Dr. H. Mahmud Nuhung, SE.,MA
2. Abd. Salam HB, SE.,M.Si, Ak, CA

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi berjudul “Efektivitas Sistem Akuntansi Penerimaan Dan Pemanfaatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Suatu Tinjauan Empiris Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Asset Daerah Kabupaten Jeneponto)” adalah betul-betul karya saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam Skripsi ini diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat sebagai tanggung jawab formal untuk di pergunakan sebagai mestinya. Akhir kata kuucapkan terimah kasih.

Makassar, 14 Oktober 2017

Yang menyatakan,

AstutiIndriani

ABSTRACT

Astuti Indriani, Nim. 105730441913. Accounting Studies Program, Faculty of Economics and Business, University of Muhammadiyah Makassar, Making Thesis with the title "Revenue Accounting System Effectiveness And Utilization Revenue (An Overview of Empirical At the Department of Revenue Finance and Asset Management Jeneponto)". Supervised by Mahmud Nuhung and Abd. Salam HB.

This study aims to determine and analyze the local revenue Revenue and Utilization of revenue (PAD) Jeneponto in finance governance. This study uses qualitative descriptive analysis technique that analyzes data based on words that are arranged in the form of expanded text. The analyzed data is data of circumstances or events that occur in the field and is also supported with the help of primary data derived from interviews and based on the study of literature.

Based on the results showed that the effectiveness of acceptance and utilization of local revenues Jeneponto conducted by the Department of Finance and Asset Management Revenue Region acting as a coordinator for each SKPD has the potential revenues for 2014-2016 effectiveness revenue collection in Jeneponto 2014 to 2016 classified in the category with an average effective for three years amounted to 93.6% .To cover up the inability of PAD to regional development spending, the central government through equalization funds from the state budget funds to provide assistance for the sake of his created equitable budgeting justice to the region.

Keywords: Acceptance and Use of revenue (PAD) Effectiveness

KATA PENGANTAR

Saya bersyukur kepada Allah SWT karena dengan berkat rahmat dan hidayah-Nya sehingga dapat menyelesaikan pembuatan proposal ini. Penulis dapat menyadari bahwa Skripsi ini bukan suatu yang *Instant*. Ini merupakan buah dari suatu proses yang relatif panjang menyita segenap tenaga dan pikiran. Penulis Skripsi ini dalam rangka memenuhi syarat agar dapat menjadi sarjana Ekonomi dari jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Yang pasti tanpa segenap motivasi, kesabaran, kerja keras dan doa mustahil bagi penulis sanggup untuk menjalani tahap demi tahap dalam kehidupan akademik di FEBIS – Universitas Muhammadiyah Makassar.

Penulis juga haturkan terimah kasih kepada orang tua tercinta yang terus mengucurkan keringat dan air mata cinta di hamparan kasih sayang tanpa kenal lelah dalam mendidik putrinya. Ibuku tercinta Jumaria, tiada kata terucap untuk membalas kucuran air mata sajadahmu karena kata tak seagung kasihmu. Demikian pula terimah kasih kepada Bapak Dr. H. Mahmud Nuhung, SE., MA. selaku pembimbing I dan Bapak Abd. Salam HB, SE.,M.Si, Ak,CA selaku pembimbing II yang telah dengan sabar, tekun, tulus dan ikhlas meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran memberikan bimbingan, motivasi, arahan, dan saran-saran yang sangat berharga kepada penulis selama penyusunan karya ilmiah ini.

1. Bapak Dr. H.Abd. Rahman Rahim, SE., MM., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar
2. Bapak Ismail Rasulong, SE.,MM., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Univerisitas Muhammadiyah Makassar

3. Bapak Ismail Badollahi, SE., M.Si. Ak., CA..., selaku ketua jurusan Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Seluruh Dosen dan staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar terima kasih atas bantuannya selama ini.
5. Teman-teman seperjuangan Ak9-2013 yang sedikit banyaknya sudah membantu saya dan sama-sama melewati tahap demi tahap untuk mendapat gelar sarjana.
6. Terima kasih kepada pihak yang telah banyak membantu, yang tidak dapat saya sebut satu persatu.

Penyusun menyadari bahwa dalam penyusunan Skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, yang tentunya tidak lepas dari segala kekurangan dan kesalahan, untuk itu penyusun senantiasa Mengharapkan saran dan kritikan yang sifatnya membangun demi perbaikan penyusunan selanjutnya. Akhir kata, skripsi ini bermanfaat bagi pembaca pada umumnya serta pada pribadi penyusun sendiri pada khususnya.

Wassalamu 'Alaikum Wr. Wb.

Makassar, 14 Oktober 2017

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
ABSTRAK BAHASA INDONESIA	v
ABSTRAK BAHASA INGGRIS	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan Penelitian	3
D. Manfaat Penelitian	3
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	5
A. Sistem Akuntansi Pemerintah	5
B. Pendapatan Asli Daerah (PAD)	14
C. Efektivitas	17
D. Penelitian Terdahulu	18
E. Kerangka Pikir	32

F. Hipotesis	33
BAB III METODE PENELITIAN	34
A. Lokasi Penelitian	34
B. Jenis Dan Sumber Penelitian	34
C. Definisi Operasional Variabel	34
D. Metode Pengumpulan Data	37
E. Metode Analisis Data	37
BAB IV GAMBARAN UMUM TEMPAT PENELITIAN.....	39
A. Latar Belakang.....	39
B. Visi Dan Misi.....	40
C. Struktur Organisasi.....	41
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	57
A. Hasil Penelitian.....	57
B. Pembahasan	82
BAB VI PENUTUP.....	87
A. Kesimpulan.....	87
B. Saran	87
DAFTAR PUSTAKA	89
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 : Daftar Penelitian Sebelumnya	26
Tabel 5.1 : Sistem Penerimaan PAD DPPKAD.....	58
Tabel 5.2 : Jenis penerimaan Pendapatan Asli Daerah	64
Tabel 5.3 : Target Penerimaan PAD Tahun 2014-2016	66
Tabel 5.4 : Realisasi Pendapatan Asli Daerah dari Tahun 2014-2016.....	66
Tabel 5.5 : Rincian Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2014-2016	69
Tabel 5.6 : Belanja Modal Pembangunan Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2014-2016	76
Tabel 5.7 : Hasil Analisis Efektivitas Penerimaan Dan Pemanfaatan Asli Daerah.....	81



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 : Kerangka Pikir	32
Gambar 2 : Struktur Organisasi	41
Gambar 3 : Sistem Penerimaan PAD DPPKAD	59
Gambar 4 : Sistem Pemanfaatan PAD DPPKAD	75



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sesuai dengan peraturan reformasi keuangan daerah yang ada saat ini, informasi keuangan dapat dikumpulkan melalui sistem dan prosedur yang mau tidak mau harus diikuti oleh pemerintah. Tuntutan terhadap terciptanya *good governance* sudah menjadi kehendak sebagian besar masyarakat dalam mencapai tujuan dan cita-cita bangsa dan negara. Akuntabilitas secara filosofi timbul karena adanya kekuasaan yang berupa mandat/amanah yang diberikan kepada seseorang untuk menjalankan tugasnya dalam rangka mencapai suatu tujuan tertentu dengan menggunakan sarana pendukung yang ada.

Pemerintah daerah berkewajiban mempublikasikan informasi berdasarkan laporan keuangan sebagai dasar pengambilan keputusan. Dengan demikian, informasi yang dipublikasikan tersebut dapat dimanfaatkan oleh para pemakai. Informasi akan bermanfaat apabila informasi tersebut dapat dipahami, dipercaya dan digunakan oleh pemakai informasi tersebut (Andriani, 2010).

Adanya penerapan otonomi daerah sebagai salah satu paradigma baru dalam sistem penyelenggaraan ketatanegaraan Indonesia telah memberi implikasi yang cukup kompleks bagi pelaksanaan pemerintah khususnya di daerah. Otonomi daerah merupakan bagian dari demokratisasi dalam menciptakan sebuah sistem yang *power share* pada setiap level pemerintah serta menuntut kemandirian sistem manajemen di daerah (Halim, Restianto,

Karman 2010: 105). Pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 59 Tahun 2007 atas perubahan Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang mengatur mengenai pedoman pengurusan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.

Penerimaan kas daerah/pendapatan daerah menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 dikelompokkan menjadi empat yakni, Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu semua pendapatan yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah, Dana Perimbangan yaitu semua pendapatan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali. Sedangkan Lain-lain Pendapatan yang Sah yaitu pendapatan yang bukan berasal dari pendapatan asli daerah maupun dana perimbangan, seperti dana kontinjensi/penyeimbang dari pemerintah dan dana darurat.

Pemerintah atau unit kerja pemerintah perlu menggunakan sistem akuntansi, dimana dengan adanya penerapan sistem akuntansi akan dapat memudahkan manajemen untuk menyediakan informasi keuangan, serta memudahkan pengelolaan keuangan suatu organisasi. Salah satunya yakni Sistem Akuntansi Sektor Publik, dimana Akuntansi Pemerintahan merupakan salah satu bagiannya. Peran utama akuntansi dalam sektor publik yaitu menyediakan informasi akuntansi yang akan digunakan oleh manajer sektor

publik dalam melakukan fungsi perencanaan dan pengendalian organisasi. Informasi akuntansi diberikan sebagai alat atau sarana untuk membantu manajer menjalankan fungsi-fungsi manajemen sehingga tujuan organisasi dapat tercapai.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan tersebut diatas, maka penelitian ini dimaksudkan untuk menjawab rumusan masalah sebagai berikut: Apakah Sistem akuntansi Penerimaan dan pemanfaatan PAD sudah efektif dalam penggunaan dana?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui efektivitas Sistem Akuntansi Penerimaan dan Pemanfaatan PAD dalam penggunaan dana.

D. Manfaat Penelitian

1. Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi tentang bahan informasi yang digunakan dalam memperbaiki kualitas laporan keuangan pemerintah daerah melalui kapasitas pemanfaatan teknologi informasi dan sistem pengendalian intern pemerintah sehingga tujuan pemerintahan dapat tercapai.

2. Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan mahasiswa dalam berpikir dan menjadi bahan informasi bagi pihak yang berkepentingan serta menambah literatur perpustakaan sehingga dapat memberikan manfaat bagi semua pihak.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Sistem Akuntansi Pemerintah

Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah menurut PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Adalah rangkaian sistematis dari prosedur, penyelenggara, peralatan, dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi pemerintah (RI 2010:3).

Mursyidi (2009:1) menyatakan akuntansi pemerintahan adalah mekanisme akuntansi yang memproses transaksi keuangan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara baik tingkat pusat maupun tingkat daerah. Sedangkan Nordiawan, Deddi, Iswahyudi Sondi Putra & Maulidah Rahmawati (2012:4) menyatakan akuntansi pemerintahan mengkhususkan dalam pencatatan dan pelaporan transaksi-transaksi yang terjadi di badan pemerintah. Akuntan pemerintah menyediakan laporan akuntansi tentang aspek kepengurusan dari administrasi keuangan negara.

1. Tujuan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah

Adapun yang menjadi tujuan Sistem Akuntansi Pemerintahan Daerah antara lain :

- a. Menjaga aset melalui pencatatan, pemrosesan dan pelaporan transaksi keuangan yang konsisten.
- b. Menyediakan informasi yang akurat dan tepat waktu tentang anggaran dan kegiatan keuangan yang berguna sebagai dasar penilaian kinerja

untuk menentukan ketaatan terhadap otorisasi anggaran dan tujuan akuntabilitas.

- c. Menyediakan informasi yang dapat dipercaya tentang posisi keuangan (Neraca)
- d. Menyediakan informasi keuangan yang berguna untuk perencanaan, pengelolaan dan pengendalian kegiatan dan keuangan secara efektif.

2. Sistem Akuntansi Penerimaan PAD

Permendagri No. 59 Tahun 2007 Pasal 187 sampai 189 mengatur tata cara pelaksanaan penerimaan daerah yang dikelola oleh bendahara penerimaan. Semua penerimaan daerah dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dikelola dalam APBD. Setiap SKPD yang mempunyai tugas memungut dan/atau menerima pendapatan daerah wajib melaksanakan pemungutan dan/atau penerimaan berdasarkan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Penerimaan SKPD dilarang digunakan langsung untuk membiayai pengeluaran, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan. Penerimaan SKPD berupa uang atau cek harus disetor ke rekening kas umum daerah paling lama 1 (satu) hari kerja. Untuk daerah yang kondisi geografisnya sulit dijangkau dengan komunikasi dan transportasi sehingga melebihi batas waktu penyetoran maka hal ini akan ditetapkan dalam peraturan kepala daerah. Penerimaan daerah disetor ke rekening kas umum daerah bank pemerintah yang ditunjuk dan kemudian bank mengirimkan nota kredit sebagai pemberitahuan atas setoran tersebut (Surat edaran BAKD,

2007:9). Langkah-langkah teknis dalam penerimaan kas sebagai berikut :

- a. PPKD menyerahkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) Daerah yang telah diterbitkan kepada Bendahara Penerimaan untuk keperluan melakukan verifikasi pada saat penerimaan pendapatan. Pengguna Anggaran menyerahkan Surat Ketetapan Retribusi (SKR) yang telah diterbitkan kepada Bendahara Penerimaan untuk keperluan melakukan verifikasi pada saat penerimaan.
- b. Wajib Pajak/Wajib Retribusi menyerahkan uang (setoran pajak/retribusi). Bendahara Penerimaan kemudian melakukan verifikasi penerimaan uang dengan SKP Daerah/SKR yang bersangkutan. Setelah melakukan verifikasi, Bendahara Penerimaan mengeluarkan Surat Tanda Bukti Pembayaran/Bukti Lain yang Sah.
- c. Bendahara Penerimaan menyiapkan Surat Tanda Setoran (STS). Bendahara Penerimaan kemudian melakukan penyetoran kepada bank disertai STS. STS yang telah diotorisasi oleh bank kemudian diterima kembali oleh Bendahara Penerimaan untuk kemudian menjadi bukti pembukuan.

3. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

Krismiaji (2005) mendefinisikan pengendalian intern sebagai suatu rencana organisasi dan metode yang digunakan untuk menjaga dan melindungi aktiva, menghasilkan informasi yang akurat, memperbaiki efisiensi, dan mendorong ditaatinya kebijakan manajemen. Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem

Pengendalian Intern Pemerintah, bahwa Sistem Pengendalian Intern (SPIP) adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Menurut Mahmudi (2010), sistem akuntansi berkaitan erat dengan sistem pengendalian internal organisasi. Sistem akuntansi yang bagus adalah sistem akuntansi yang didalamnya mengandung sistem pengendalian yang memadai. Pengertian sistem pengendalian intern adalah proses yang integral dari tindakan dan kegiatan yang dilakukan oleh manajemen (eksekutif) dan jajarannya untuk memberikan jaminan atau keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 tahun 2008 disebutkan bahwa, untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, menteri/pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/walikota wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan. Pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan tersebut dilaksanakan dengan

berpedoman pada Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). SPIP ini dimaksudkan dengan tujuan memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintah negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Sistem pengendalian intern meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi, dan dipatuhinya kebijakan manajemen. Menurut tujuannya, pengendalian intern dapat dibagi menjadi dua yaitu pengendalian intern akuntansi (*intern accounting contro*) dan pengendalian intern administratif (*internal administrative control*). Pengendalian intern akuntansi yang merupakan bagian dari sistem pengendalian intern, meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan terutama untuk menjaga kekayaan organisasi dan mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi. Pengendalian intern akuntansi yang baik akan menjamin keamanan kekayaan para investor dan kreditur yang ditanamkan dalam organisasi dan akan menghasilkan laporan keuangan yang dapat dipercaya. Pengendalian intern administratif meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan terutama untuk mendorong efisiensi dan dipatuhinya kebijakan manajemen (Mulyadi, 2010).

Adapun unsur Sistem Pengendalian Intern Pemerintah berdasarkan

PP 60 tahun 2008 antara lain:

- a. Lingkungan pengendalian
- b. Penilaian resiko
- c. Kegiatan pengendalian
- d. Informasi dan komunikasi
- e. Pemantauan pengendalian intern.

Disebutkan pula dalam PP 60 tahun 2008 bahwa dalam pelaksanaannya, unsur SPIP tersebut dilaksanakan menjadi suatu bagian integral dari kegiatan instansi pemerintah. Dalam unsur lingkungan pengendalian, pimpinan instansi pemerintah wajib menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan Sistem Pengendalian Intern dalam lingkungan kerjanya melalui penegakan integritas dan nilai etika, komitmen terhadap kompetensi, kepemimpinan yang kondusif, pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan, pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat, penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia, perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif serta melalui hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah terkait.

Unsur pengendalian intern yang kedua yaitu penilaian resiko. Penilaian resiko diawali dengan penetapan maksud dan tujuan instansi pemerintah yang jelas dan konsisten baik pada tingkat instansi maupun tingkat kegiatan. Kemudian mengidentifikasi secara efisien dan efektif

resiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan tersebut, baik yang bersumber dari dalam maupun luar instansi. Terhadap resiko yang telah diidentifikasi dianalisis untuk mengetahui pengaruhnya terhadap pencapaian tujuan. Pimpinan instansi pemerintah merumuskan pendekatan manajemen resiko dan kegiatan pengendalian resiko yang diperlukan untuk memperkecil resiko (PP 60 tahun 2008).

Kegiatan pengendalian intern adalah kebijakan dan prosedur yang dapat membantu memastikan dilaksanakannya arahan pimpinan instansi pemerintah untuk mengurangi resiko yang telah diidentifikasi selama proses penilaian resiko (PP 60 tahun 2008). Mahmudi (2010) menyebutkan, komponen penting yang terkait dengan sistem pengendalian intern khususnya kegiatan pengendalian antara lain :

a. Sistem dan Prosedur Akuntansi

Sistem dan prosedur akuntansi keuangan daerah merupakan serangkaian tahap dan langkah yang harus dilalui dalam melakukan fungsi akuntansi tertentu. Sistem dan prosedur akuntansi yang terdapat di pemerintah daerah meliputi :

- 1) Sistem dan prosedur penerimaan kas
- 2) Sistem dan prosedur pengeluaran kas
- 3) Sistem dan prosedur akuntansi selain kas
- 4) Sistem dan prosedur akuntansi aset

b. Otorisasi

Otorisasi dalam sistem akuntansi pemerintah daerah sangat

penting karena tanpa sistem otorisasi yang baik, maka keuangan daerah sangat berisiko untuk terjadi kebocoran. Sistem otorisasi menunjukkan ketentuan tentang orang atau pejabat yang bertanggung jawab mengotorisasi suatu transaksi yang terjadi di pemerintah daerah. Otorisasi tersebut bisa berbentuk kewenangan dalam memberikan tanda tangan pada formulir dan dokumen tertentu. Tanpa otorisasi dari pihak yang berwenang maka transaksi tidak dapat dilakukan, atau walaupun ada transaksi tanpa otorisasi maka transaksi tersebut dikategorikan tidak sah dan ilegal.

c. Formulir, dokumen, dan catatan

Setiap transaksi yang terjadi dipemerintah daerah harus didukung dengan bukti transaksi yang valid dan sah. Selain terdapat bukti yang valid dan sah, transaksi tersebut harus dicatat dalam buku catatan akuntansi. Kelengkapan formulir dan dokumen transaksi serta catatan akuntansi sangat penting dalam proses audit keuangan.

d. Pemisahan tugas

Fungsi-fungsi atau pihak-pihak yang terkait dalam suatu transaksi harus dipisahkan. Suatu transaksi dari awal hingga akhir tidak boleh ditangani oleh satu fungsi atau satu orang saja. Harus dipisahkan antara fungsi pemegang uang dengan pencatat uang serta pengotorisasi. Harus dilakukan pemisahan tugas secara tegas dengan deskripsi tugas pokok dan fungsi (tupoksi) yang jelas dalam rangka menghindari terjadinya kolusi, kecurangan, dan korupsi.

Dijelaskan pula dalam PP 60 tahun 2008, bahwa instansi pemerintah harus memiliki informasi yang relevan dan dapat diandalkan baik informasi keuangan maupun nonkeuangan, yang berhubungan dengan peristiwa-peristiwa eksternal serta internal. Informasi tersebut harus direkam dan dikomunikasikan kepada pimpinan instansi pemerintah dan lainnya di seluruh instansi pemerintah yang memerlukannya dalam bentuk serta dalam kerangka waktu, yang memungkinkan yang bersangkutan melaksanakan pengendalian intern dan tanggung jawab operasional.

Unsur pengendalian intern berdasarkan PP 60 tahun 2008 yang kelima yaitu pemantauan pengendalian intern. Pemantauan SPI dilaksanakan melalui pemantauan berkelanjutan, evaluasi terpisah, dan tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan reuiu lainnya. Pemantauan berkelanjutan diselenggarakan melalui kegiatan pengelolaan rutin, supervisi, perbandingan, rekonsiliasi, dan tindakan lain yang terkait dalam pelaksanaan tugas. Evaluasi terpisah diselenggarakan melalui penilaian sendiri, reuiu, dan pengujian efektivitas SPI yang dapat dilakukan oleh aparat pengawasan intern pemerintah atau pihak eksternal pemerintah dengan menggunakan daftar uji pengendalian intern.

Jadi, Pengendalian Intern dapat dikatakan sebagai suatu proses yang telah dirancang sedemikian rupa dengan memanfaatkan teknologi untuk mencapai tujuan yang diinginkan pemerintahan. Selain itu, pengendalian intern bermaksud untuk memberikan keyakinan atas pencapaiannya dalam penyelenggaraan pemerintah.

B. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang diusahakan langsung oleh Pemerintah Daerah yang meliputi : Hasil pajak daerah, Hasil retribusi daerah, Hasil perusahaan milik daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Dana sumbangan keuangan pusat dan daerah terdiri dari : Bagi hasil (bagian daerah) dari pajak bumi dan bangunan, bea peralihan hak atas tanah dan bangunan dan penerimaan dari sumber daya alam, Dana alokasi khusus dan Pinjaman daerah.

1. Klasifikasi Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli daerah dapat dipisahkan menjadi 4 jenis yaitu :

a. Pendapatan Asli Daerah

1) Pajak Daerah

Pajak daerah adalah pajak yang wewenang pemungutannya ada pada Pemerintah Daerah yang pelaksanaannya dilakukan oleh Dinas Pelayanan Pajak. Pajak daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, ada 11 jenis pajak daerah diantaranya 4 jenis pajak daerah provinsi dan 7 jenis pajak daerah kabupaten/kota. Pajak daerah kabupaten/kota ada 7 jenis yaitu : Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C, dan Pajak Parkir (Suandy, 2013:37).

2) Retribusi Daerah

Retribusi daerah juga menjadi unsur yang sangat berpengaruh besar terhadap Pendapatan Asli Daerah. Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan

3) Hasil pengolahan kekayaan daerah yang dipisahkan

4) Lain-lain Pendapatan daerah yang sah

b. Dana Perimbangan

Dana Perimbangan terdiri dari :

- 1) Dana bagi hasil pajak dan sumber daya alam
 - a) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);
 - b) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
 - c) Pajak penghasilan (PPh) pasal 25 dan pasal 29 wajib pajak orang pribadi dalam negeri dan PPh 21.
 - d) Sumber daya alam kehutanan;
 - e) Pertambangan umum;
 - f) Pertambangan minyak bumi;
 - g) Pertambangan gas bumi

c. Pinjaman Daerah

d. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

2. Penerimaan Pendapatan Asli Daerah

Penerimaan Pendapatan Asli Daerah dapat dilaksanakan dengan 3

(Tiga) mekanisme/prosedur, yaitu :

- a. Pembayaran langsung melalui Bendahara penerimaan.
- b. Pihak Ketiga/Wajib Pajak/Wajib Retribusi menyetorkan uang melalui Bendahara Penerimaan Pembantu, kemudian Bendahara Penerimaan Pembantu melaporkan kepada Bendahara Penerimaan.
- c. Pihak Ketiga/Wajib Pajak/Wajib Retribusi menyetorkan uang melalui Bank pemerintah yang ditunjuk, Bank Lain, Badan, Lembaga Keuangan dan/atau Kantor Pos.

3. Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan

Bendahara penerimaan wajib mempertanggungjawabkan pengelolaan uang berada dalam tanggung jawabnya sesuai dengan PERMENDAGRI No. 59 Tahun 2007 Pasal 14. Bendahara penerimaan wajib mempertanggungjawabkan dengan cara berikut ini:

- a. Administratif atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran melalui PPK-SKPD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
- b. Fungsional atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada PPKD selaku BUD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

4. Pemanfaatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pengeluaran pemerintah mencerminkan kebijakan

pemerintah. Apabila pemerintah telah menetapkan suatu kebijakan untuk membeli barang dan jasa, pengeluaran pemerintah mencerminkan biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah untuk melaksanakan kebijakan tersebut.

Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat menghasilkan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan yang maksimal guna kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, untuk dapat mengendalikan tingkat efisiensi dan efektivitas anggaran, maka dalam perencanaan anggaran perlu diperhatikan (1) penetapan secara jelas tujuan dan sasaran, hasil dan manfaat, serta indikator kinerja yang ingin dicapai; (2) penetapan prioritas kegiatan dan penghitungan beban kerja, serta penetapan harga satuan yang rasional.

C. Efektivitas

Efektivitas adalah suatu keadaan yang mengandung pengertian mengenai terjadinya sesuatu efek atau akibat yang dikehendaki. Kata “efektif” berarti terjadinya suatu efek atau akibat yang dikehendaki, dalam suatu perbuatan. Setiap pekerjaan yang efisien yang tentu juga berarti efektif, karena dilihat dari segi hasil, tujuan atau akibat yang dikehendaki dengan perbuatan itu telah tercapai bahkan secara maksimal (mutu dan jumlahnya), sebaliknya dilihat dari segi usaha, efek yang diharapkan juga telah tercapai. Setiap pekerjaan yang efektif belum tentu efisien, karena hasil dapat tercapai tapi mungkin dengan penghamburan pikiran, tenaga, waktu, ruang atau benda.

Efektivitas organisasi sama dengan prestasi organisasi secara

keseluruhan (Indra Wijaya). Efektivitas organisasi dapat dinyatakan sebagai tingkat keberhasilan organisasi dalam usaha mencapai tujuan dan sasaran (Lubis, dkk). Efektivitas suatu organisasi tergantung kepada seberapa jauh ia mencapai tujuan atau sasaran (Kasim). Efektivitas sejauhmana organisasi melaksanakan seluruh tugas pokoknya atau mencapai semua sasarannya (Richard M, Steers). Keempat pandangan ini, menitikberatkan pengukuran efektivitas organisasi pada seberapa besar organisasi mencapai tujuan atau sasarannya.

Konsep efektivitas biasanya selalu terkait dengan konsep efisiensi, yaitu suatu proses internal yang terjadi dalam suatu organisasi yang menunjukkan banyaknya input atau sumber yang diperlukan oleh organisasi untuk menghasilkan satu satuan output. Karena itu, efisiensi dapat diukur sebagai Ratio input terhadap output (Lubis, dkk).

Efektivitas yang umum menunjukkan pada taraf tercapainya hasil, dalam bahasa sederhana hal tersebut dapat dijelaskan bahwa : efektivitas dari pemerintah daerah adalah bila tujuan pemerintah daerah tersebut dapat dicapai sesuai dengan kebutuhan yang direncanakan. Sesuai dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, efektivitas adalah pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil.

D. Penelitian Terdahulu

Karamoy (2013) dengan judul Evaluasi Pelaksanaan Sistem dan Prosedur Penerimaan Kas pada Dinas Pendapatan Kota Manado. Tujuan dari

ini penelitian ini untuk mengetahui pelaksanaan sistem dan prosedur penerimaan kas serta mengevaluasi sistem dan prosedur penerimaan kas pada Dinas Pendapatan Kota Manado. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara keseluruhan sistem dan prosedur penerimaan kas sudah memadai.

Tuerah (2013) dengan judul *Evaluasi Pelaksanaan Sistem dan Prosedur Penerimaan dan Pengeluaran Kas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Minahasa Tenggara*. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan sistem dan prosedur penerimaan dan pengeluaran kas pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Tenggara. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas telah dijalankan sesuai dengan peraturan yang digunakan.

EvanaEinde (2007) dengan judul *Analisis Sistem dan Prosedur Akuntansi Keuangan Daerah berdasarkan Permendagri No.13 Tahun 2006 pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pendapatan Daerah Lampung*. Tujuan dari penelitian ini untuk mengevaluasi sistem dan prosedur pengelolaan keuangan pada objek yang diteliti serta untuk mengetahui efisien dan efektifitas pengelolaan keuangan daerah khususnya penerimaan dari PAD. Metode yang digunakan adalah deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa SKPD Pendapatan Daerah Lampung belum menerapkan Pedoman Permendagri No.13 Tahun 2006 tentang pedoman pengurusan, pertanggungjawaban, pengawasan keuangan, pencatatan akuntansi yang benar.

Kadir Akhiruddin (2003) : “Analisis Upaya Pajak Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2003-2007”, mengungkapkan potensi Pajak Daerah yang terus meningkat dari tahun ke tahun membuka kesempatan bagi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Morowali apabila digali dan dikelola dengan baik. Kontribusi Pajak Daerah terhadap PAD dalam kurun lima tahun terakhir menunjukkan hasil yang bervariasi. Tahun 2004 merupakan tahun dengan kontribusi Pajak Daerah yang terbesar yaitu mencapai angka 20,46%. Dengan potensi Pajak Daerah yang terus meningkat dari tahun ke tahun maka diharapkan realisasi penerimaan pajak daerah dapat ditingkatkan yang selanjutnya dapat meningkatkan penerimaan PAD di masa yang akan datang.

Indriasari & Nahartyo (2008) dengan judul penelitian “Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Pengendalian Intern Akuntansi Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Pemerintah Kota Palembang dan Kabupaten Ogan Ilir). Variabel yang digunakan adalah Kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi dan pengendalian intern akuntansi, sebagai variabel independen dan nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah sebagai variabel dependennya. Penelitian ini dilakukan pada SKPD di Kota Palembang dan Kabupaten Ogan Ilir, dengan jumlah sampel sebanyak 117 orang. Hasil yang ditunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi, dan pengendalian intern akuntansi memiliki pengaruh

positif terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah. Kapasitas SDM berpengaruh negatif. Pemanfaatan teknologi informasi, dan kapasitas SDM memiliki pengaruh positif terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan pemerintah daerah.

Penelitian selanjutnya pernah dilakukan oleh Siti Soimah (2014) dengan judul pengaruh Kapasitas SDM, Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Utara “variabel yang digunakan adalah kapasitas SDM, Pemanfaatan TI dan Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Bengkulu Utara.

Peneliti sebelumnya seperti Mutiara Maemunah (2006) yang meneliti di Sumatra, Bambang Prakosa (2004) yang meneliti di DIY dan Jawa Tengah, Syukriy & Halim (2003) yang meneliti di Jawa dan Bali memperoleh hasil yaitu PAD dan DAU signifikan berpengaruh terhadap Belanja Daerah. Noni Puspita Sari (2009) yang meneliti di Riau memperoleh hasil yaitu DAU memberikan pengaruh yang signifikan terhadap belanja langsung. Sedangkan PAD menunjukkan pengaruh yang tidak signifikan terhadap Belanja Langsung, bahwa PAD secara individual tidak mempengaruhi belanja langsung.

Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Raisa Stephanie Janis Jullie Sondakh dan Harijanto Sabijono (2015) dengan judul penelitian analisis sistem dan prosedur penerimaan PAD pada dinas pendapatan

pengelolaan keuangan dan aset daerah kabupaten sitaro. Hasil peneltian diperoleh bahwa Secara umum DPPKAD Kabupaten Sitaro telah menerapkan sistem dan prosedur penerimaan PAD sesuai dengan PERMENDAGRI No.59 Tahun 2007.Namun pelaksanaan pengendalian intern belum memadai pada bidang akuntansi yang belum melaksanakan pencatatan atas penerimaan PAD ke dalam buku jurnal.Sebaiknya DPPKAD Kabupaten Sitaro memperbanyak sosialisasi dan bimbingan teknis untuk meningkatkan SDM yang ada.

Penelitian sebelumnya juga dilakukan oleh JeaneMaitulung, HendrikManosoh dan Victorina Z. Tirayoh (2015) dengan judul penelitian evaluasi penerapan sistem akuntansi penerimaan Pendapatan asli daerah pada pemerintah Kabupaten kepulauan sangihe. Hasil penelitian terhadap evaluasi sistem akuntansi penerimaan pendapatan asli Daerah menggambarkan bahwa sistem dan prosedur di Dinas PPKA Kabupaten Kepulauan Sangihe belum berjalan dengan baik.

Kemudian Penelitian dilakukan oleh Nur Indah Rahmawati (2010) dengan judul pengaruhpendapatan asli daerah(PAD) dan dana alokasi umum (dau)terhadap alokasi belanja daerah(Studi Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa DAU dan PAD mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap alokasi belanja daerah.Jika dilihat lebih lanjut, tingkat ketergantungan alokasi belanja daerah lebih dominan terhadap PAD daripada DAU.

Penelitian selanjutnya dilakukan As SyifahNurillah Tahun 2014 dengan judul “Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem

Akuntansi keuangan Daerah, Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Studi Empiris Pada SKPD Kota Depok). Hasil penelitian pengujian hipotesis adalah kompetensi SDM, penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, pemanfaatan teknologi informasi dan sistem pengendalian intern pemerintah mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Penelitian Roviyantie (2011) menunjukkan bahwa sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap informasi pelaporan keuangan. Sejalan dengan Roviyantie (2011), penelitian Tantri (2012) juga mengatakan terdapat hubungan yang positif antara sumber daya manusia dengan nilai informasi pelaporan keuangan.

Julia Palit (2012) dengan judul Analisis Penerapan Sistem Akuntansi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah di Kota Manado. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis kesesuaian Sistem Akuntansi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah di Pemerintah Kota Manado. Metode yang digunakan adalah analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penerimaan kas di Dinas Pendapatan Kota Manado sesuai dengan Permendagri No. 13 Tahun 2006 yang didalamnya terdapat sistem dan prosedur pendapatan daerah melalui bendahara penerimaan, bendahara penerimaan pembantu dan melalui bank.

Yohana Paliling (2006) "Analisis Potensi Retribusi Pasar Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Mimika", mengungkapkan

bahwa Realisasi Retribusi Pasar pada tahun 2003 masih rendah yaitu 39,38% dari potensi retribusi pasar pada tahun yang sama dan penentuan target retribusi pasar juga masih rendah yaitu 39,4% dari potensi yang sebenarnya.

Penelitian yang dilakukan oleh Puspita Sari (2009) menguji Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) Dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Langsung Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Riau. Ada tiga simpulan yang merupakan hasil penelitian yang telah dilakukan yaitu: Pertama, DAU mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap belanja langsung. Kedua, PAD secara parsial tidak mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap belanja langsung secara parsial. Ketiga, DAU dan PAD secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Belanja Langsung.

Tuasikal (2007) melakukan penelitian tentang “Pengaruh Pemahaman Sistem Akuntansi Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap Kinerja Satuan Kerja Pemerintah Daerah (Studi pada Kabupaten Maluku Tengah di Provinsi Maluku)”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan maupun parsial, pemahaman mengenai sistem akuntansi dan pengelolaan keuangan berpengaruh terhadap kinerja satuan kerja pemerintah daerah. Apabila pengelolaan keuangan daerah dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku dan adanya peningkatan pemahaman tentang akuntansi keuangan daerah, maka kinerja satuan kerja pemerintah daerah akan meningkat.

Warisno (2009) melakukan penelitian tentang “Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi”. Hasil penelitian tersebut

menyimpulkan bahwa kualitas sumber daya manusia, komunikasi, sarana pendukung, dan komitmen organisasi secara simultan berpengaruh positif secara signifikan terhadap kinerja SKPD.

Penelitian dilakukan oleh Arifianti (2011) dengan judul “Nilai informasi pelaporan keuangan pemda, sumber daya manusia, sistem pengendalian intern, pemanfaatan teknologi informasi, pengawasan keuangan. Hasil penelitian mengatakan bahwa Sumber daya manusia, SPIP (sistem pengendalian intern pemerintah), teknologi informasi, dan pengawasan keuangan daerah berpengaruh terhadap nilai informasi pelaporan keuangan.

Penelitian dilakukan oleh Sukmaningrum (2012) dengan judul “Nilai informasi pelaporan keuangan pemda, sumber daya manusia, sistem pengendalian intern, dan faktor eksternal”. Hasil penelitian mengataka bahwa Sumber daya manusia, SPIP (sistem pengendalian intern pemerintah), dan faktor eksternal berpengaruh terhadap nilai informasi pelaporan keuangan.

Penelitian dilakukan oleh Zuliarti (2012) dengan judul “Nilai informasi pelaporan keuangan pemda, sumber daya manusia, sistem pengendalian intern, dan teknologi informasi. Hasil penelitian mengatakan bahwa Sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap nilai informasi pelaporan keuangan, SPIP (sistem pengendalian intern pemerintah) dan teknologi informasi berpengaruh terhadap nilai informasi pelaporan keuangan.

Penelitian terdahulu dapat dijadikan bahan referensi untuk penelitian ini tertuang dalam bentuk tabel berikut ini.

Tabel 2.1
Daftar Penelitian Sebelumnya

No	Peneliti	Tahun	Judul	Hasil
1	Karamoy	2013	Pelaksanaan Sistem dan Prosedur Penerimaan Kas pada Dinas Pendapatan Kota Manado	Menunjukkan bahwa secara keseluruhan sistem dan prosedur penerimaan kas sudah memadai.
2	Tuerah	2013	Evaluasi Pelaksanaan Sistem dan Prosedur Penerimaan dan Pengeluaran Kas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Minahasa Tenggara	Penelitian menunjukkan bahwa sistem akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas telah dijalankan sesuai dengan peraturan yang digunakan.
3	EvanaEinde	2007	Analisis Sistem dan Prosedur Akuntansi Keuangan Daerah berdasarkan Permendagri No.13 Tahun 2006 pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pendapatan Daerah Lampung	Menunjukkan bahwa SKPD Pendapatan Daerah Lampung belum menerapkan Pedoman Permendagri No.13 Tahun 2006 tentang pedoman pengurusan, pertanggungjawaban, pengawasaan keuangan, pencatatan akuntansi yang benar.
4	KadirAkhiruddin	2003	Analisis Upaya Pajak Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2003-2007	Kontribusi Pajak Daerah terhadap PAD dalam kurun lima tahun terakhir menunjukkan hasil yang bervariasi. Tahun 2004 merupakan tahun dengan kontribusi Pajak Daerah yang terbesar yaitu mencapai angka 20,46%. Dengan potensi Pajak

No	Peneliti	Tahun	Judul	Hasil
				Daerah yang terus meningkat dari tahun ke tahun maka diharapkan realisasi penerimaan pajak daerah dapat ditingkatkan yang selanjutnya dapat meningkatkan penerimaan PAD di masa yang akan datang.
5	Indriasari & Nahartyo	2008	Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Pengendalian Intern Akuntansi Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Pemerintah Kota Palembang dan Kabupaten Ogan Ilir)	bahwa Pemanfaatan teknologi informasi, dan pengendalian intern akuntansi memiliki pengaruh positif terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah. Kapasitas SDM berpengaruh negatif. Pemanfaatan teknologi informasi, dan kapasitas SDM memiliki pengaruh positif terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan pemerintah daerah.
6	Siti Soimah	2014	Pengaruh Kapasitas SDM, Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Utara	Kapasitas SDM, Pemanfaatan TI dan Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Bengkulu Utara.

No	Peneliti	Tahun	Judul	Hasil
7	Mutiara Maemunah	2006	PAD dan DAU signifikan berpengaruh terhadap Belanja Daerah	DAU memberikan pengaruh yang signifikan terhadap belanja langsung. Sedangkan PAD menunjukkan pengaruh yang tidak signifikan terhadap Belanja Langsung, bahwa PAD secara individual tidak mempengaruhi belanja langsung.
8	RaisaStephanieJan is1 JullieSondakh dan HarijantoSabijono	2015	Analisis sistem dan prosedur penerimaan pad pada dinas pendapatan pengelolaan keuangan dan aset daerah kabupaten sitaro	Secara umum DPPKAD Kabupaten Sitaro telah menerapkan sistem dan prosedur penerimaan PAD sesuai dengan PERMENDAGRI No.59 Tahun 2007. Namun pelaksanaan pengendalian intern belum memadai pada bidang akuntansi yang belum melaksanakan pencatatan atas penerimaan PAD ke dalam buku jurnal. Sebaiknya DPPKAD Kabupaten Sitaro memperbanyak sosialisasi dan bimbingan teknis untuk meningkatkan SDM yang ada.
9	JeaneMaitulung, HendrikManossoh ,danVictorina Z. Tirayoh	2015	Evaluasi penerapan sistem akuntansi penerimaan Pendapatan asli daerah pada pemerintah Kabupaten kepulauan	Hasil penelitian terhadap evaluasi sistem akuntansi penerimaan pendapatan asli Daerah menggambarkan bahwa sistem dan prosedur di Dinas

No	Peneliti	Tahun	Judul	Hasil
			sangihe	PPKA Kabupaten Kepulauan Sangihe belum berjalan dengan baik karena
10	NurIndahRahmawati	2010	Pengaruh pendapatan asli daerah (PAD) dan dana alokasi umum (dau) terhadap alokasi belanja daerah (Studi Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah)	Menunjukkan bahwa DAU dan PAD mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap alokasi belanja daerah. Jika dilihat lebih lanjut, tingkat ketergantungan alokasi belanja daerah lebih dominan terhadap PAD daripada DAU.
1s1 1	As SyifahNurillah	2014	Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Akuntansi keuangan Daerah, Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Studi Empiris Pada SKPD Kota Depok)	pengujian hipotesis adalah kompetensi SDM, penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, pemanfaatan teknologi informasi dan sistem pengendalian intern pemerintah mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah
12	Roviyanti	2011	sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap informasi pelaporan keuangan.	Terdapat hubungan yang positif antara sumber daya manusia dengan nilai informasi pelaporan keuangan.
13	Julia Palit	2012	Analisis Penerapan Sistem Akuntansi Penerimaan	Menunjukkan bahwa Penerimaan kas di Dinas

No	Peneliti	Tahun	Judul	Hasil
			Pendapatan Asli Daerah di Kota Manado	Pendapatan Kota Manado sesuai dengan Permendagri No. 13 Tahun 2006 yang didalamnya terdapat sistem dan prosedur pendapatan daerah melalui bendahara penerimaan, bendahara penerimaan pembantu dan melalui bank
14	YohanaPaliling	2006	Analisis Potensi Retribusi Pasar Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Mimika	Realisasi Retribusi Pasar pada tahun 2003 masih rendah yaitu 39,38 % dari potensi retribusi pasar pada tahun yang sama dan penentuan target retribusi pasar juga masih rendah yaitu 39,4 % dari potensi yang sebenarnya
15	Puspita Sari	2009	Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) Dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Langsung Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Riau.	Hasil penelitian yang telah dilakukan yaitu: Pertama, DAU mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap belanja langsung. Kedua, PAD secara parsial tidak mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap belanja langsung secara parsial. Ketiga, DAU dan PAD secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Belanja Langsung.

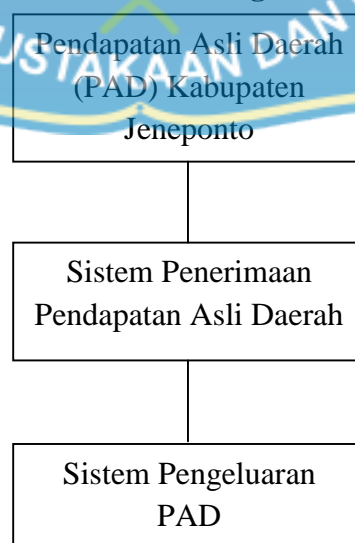
No	Peneliti	Tahun	Judul	Hasil
16	Tuasikal	2007	Pengaruh Pemahaman Sistem Akuntansi Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap Kinerja Satuan Kerja Pemerintah Daerah (Studi pada Kabupaten Maluku Tengah di Provinsi Maluku)	Bahwa secara simultan maupun parsial, pemahaman mengenai sistem akuntansi dan pengelolaan keuangan berpengaruh terhadap kinerja satuan kerja pemerintah daerah. Apabila pengelolaan keuangan daerah dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku dan adanya peningkatan pemahaman tentang akuntansi keuangan daerah, maka kinerja satuan kerja pemerintah daerah akan meningkat.
17	Warisno	2009	Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi	Kualitas sumber daya manusia, komunikasi, sarana pendukung, dan komitmen organisasi secara simultan berpengaruh positif secara signifikan terhadap kinerja SKPD.
18	Arifianti	2011	Nilai informasi pelaporan keuangan pemda, sumber daya manusia, system pengendalian intern, pemanfaatan teknologi informasi, pengawasan keuangan	Sumber daya manusia, SPIP (sistem pengendalian intern pemerintah), teknologi informasi, dan pengawasan keuangan daerah berpengaruh terhadap nilai informasi pelaporan keuangan
19	Sukmaningrum	2012	Nilai informasi pelaporan	Sumber daya manusia, SPIP

No	Peneliti	Tahun	Judul	Hasil
			keuangan pemda, sumber daya manusia, sistem pengendalian intern, dan faktor eksternal	(sistem pengendalian intern pemerintah), dan faktor eksternal berpengaruh terhadap nilai informasi pelaporan keuangan
20	Zuliarti	2012	Nilai informasi pelaporan keuangan pemda, sumber daya manusia, sistem pengendalian intern, dan teknologi informasi	Sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap nilai informasi pelaporan keuangan, SPIP (sistem pengendalian intern pemerintah) dan teknologi informasi berpengaruh terhadap nilai informasi pelaporan keuangan

E. Kerangka Pikir

Adapun kerangka pikir dari penelitian “Analisis sistem Akuntansi Penerimaan Dan Pemanfaatan PAD serta Efektifitasnya (Suatu Tinjauan Empiris Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Jeneponto)”

Gambar 1. Kerangka Pikir



F.

G. Hipotesis

Berdasarkan perumusan masalah dan teori para peneliti sebelumnya, maka hipotesis penelitian ini adalah Sistem Akuntansi Penerimaan dan pemanfaatan PAD sudah efektif berdasarkan anggaran yang dibuat.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Kantor Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Jeneponto Sulawesi Selatan pada tanggal 08 Mei sampai 07 Juni 2017

B. Jenis dan Sumber Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Analisis deskriptif kualitatif adalah kegiatan dimana tingkat pekerjaannya mencakup cara-cara pengumpulan, menyusun atau mengatur, mengolah, menyajikan dan menganalisis data angka agar dapat memberikan gambaran yang teratur, ringkas dan jelas mengenai keadaan, peristiwa, atau gejala tertentu sehingga dapat ditarik pengertian atau makna tertentu.

Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari data primer dan data sekunder. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah hasil kuisioner oleh responden seputar variabel yang dimaksud. Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah struktur organisasi Dinas Pendapatan Pengeluaran Asset Daerah Kabupaten Jenepontor dan gambaran umum Kabupaten Jeneponto.

C. Definisi Operasional Variabel

1. Sistem Akuntansi Penerimaan PAD

Permendagri No. 59 Tahun 2007 Pasal 187 sampai 189 mengatur

tata cara pelaksanaan penerimaan daerah yang dikelola oleh bendahara penerimaan. Semua penerimaan daerah dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dikelola dalam APBD. Setiap SKPD yang mempunyai tugas memungut dan/atau menerima pendapatan daerah wajib melaksanakan pemungutan dan/atau penerimaan berdasarkan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Penerimaan SKPD dilarang digunakan langsung untuk membiayai pengeluaran, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan. Penerimaan SKPD berupa uang atau cek harus disetor ke rekening kas umum daerah paling lama 1 (satu) hari kerja. Untuk daerah yang kondisi geografisnya sulit dijangkau dengan komunikasi dan transportasi sehingga melebihi batas waktu penyetoran maka hal ini akan ditetapkan dalam peraturan kepala daerah. Penerimaan daerah disetor ke rekening kas umum daerah bank pemerintah yang ditunjuk dan kemudian bank mengirimkan nota kredit sebagai pemberitahuan atas setoran tersebut (Surat edaran BAKD, 2007:9). Langkah-langkah teknis dalam penerimaan kas sebagai berikut :

- a. PPKD menyerahkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) Daerah yang telah diterbitkan kepada Bendahara Penerimaan untuk keperluan melakukan verifikasi pada saat penerimaan pendapatan. Pengguna Anggaran menyerahkan Surat Ketetapan Retribusi (SKR) yang telah diterbitkan kepada Bendahara Penerimaan untuk keperluan melakukan verifikasi pada saat penerimaan.
- b. Wajib Pajak/Wajib Retribusi menyerahkan uang (setoran

pajak/retribusi). Bendahara Penerimaan kemudian melakukan verifikasi penerimaan uang dengan SKP Daerah/SKR yang bersangkutan. Setelah melakukan verifikasi, Bendahara Penerimaan mengeluarkan Surat Tanda Bukti Pembayaran/Bukti Lain yang Sah.

- c. Bendahara Penerimaan menyiapkan Surat Tanda Setoran (STS). Bendahara Penerimaan kemudian melakukan penyetoran kepada bank disertai STS. STS yang telah diotorisasi oleh bank kemudian diterima kembali oleh Bendahara Penerimaan untuk kemudian menjadi bukti pembukuan.

2. Sistem Pemanfaatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pengeluaran pemerintah mencerminkan kebijakan pemerintah. Apabila pemerintah telah menetapkan suatu kebijakan untuk membeli barang dan jasa, pengeluaran pemerintah mencerminkan biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah untuk melaksanakan kebijakan tersebut.

Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat menghasilkan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan yang maksimal guna kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, untuk dapat mengendalikan tingkat efisiensi dan efektivitas anggaran, maka dalam perencanaan anggaran perlu diperhatikan (1) penetapan secara jelas tujuan dan sasaran, hasil dan manfaat, serta indikator kinerja yang ingin dicapai; (2) penetapan prioritas kegiatan dan penghitungan beban kerja, serta penetapan harga satuan yang rasional.

3. Efektivitas Penggunaan Dana

Konsep efektivitas biasanya selalu terkait dengan konsep efisiensi, yaitu suatu proses internal yang terjadi dalam suatu organisasi yang menunjukkan banyaknya input atau sumber yang diperlukan oleh organisasi untuk menghasilkan satu satuan output. Karena itu, efisiensi dapat diukur sebagai Ratio input terhadap output (Lubis, dkk).

Efektivitas yang umum menunjukkan pada taraf tercapainya hasil, dalam bahasa sederhana hal tersebut dapat dijelaskan bahwa : efektivitas dari pemerintah daerah adalah bila tujuan pemerintah daerah tersebut dapat dicapai sesuai dengan kebutuhan yang direncanakan. Sesuai dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, efektivitas adalah pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil.

D. Metode Pengumpulan Data

Data yang digunakan adalah data primer. Dimana data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara). Indriantoro & Supomo (2002). Metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi dan pengamatan.

E. Metode Analisis Data

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif kualitatif adalah kegiatan dimana

tingkat pekerjaannya mencakup cara-cara pengumpulan, menyusun atau mengatur, mengolah, menyajikan dan menganalisis data agar dapat memberikan gambaran yang teratur, ringkas dan jelas mengenai keadaan, peristiwa, atau gejala tertentu sehingga dapat ditarik pengertian atau makna tertentu.

Analisis data yang digunakan adalah perhitungan Efektivitas Pendapatan Asli Daerah

$$\text{Rasio Efektivitas PAD} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Target Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Kriteria Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah dikategorikan efektif apabila rasio ini mencapai dari 1 atau 100%. Namun demikian semakin tinggi rasio efektivitas, menggambarkan kemampuan daerah yang semakin baik.

Menurut Abd Halim (2007) untuk melihat kriteria rasio efektif apabila:

100% Keatas	= Sangat Efektif
50%-100%	= Efektif
30%-50%	= Cukup Efektif
20%-30%	= Kurang Efektif
10%-20%	= Tidak Efektif

BAB IV

GAMBARAN UMUM TEMPAT PENELITIAN

A. Latar Belakang Dinas Pendapatan Dan Pengelolaan Keuangan Dan Asset Daerah Kabupaten Jeneponto

Pelaksanaan otonomi daerah telah memberikan kepada daerah kewenangan yang nyata, luas dan bertanggungjawab. Untuk itu maka pemerintah daerah diberi keleluasaan untuk merencanakan dan melaksanakan pembangunan sesuai dengan potensi dan sumber daya setempat.

Dalam mengantisipasi hal tersebut peran, tugas pokok dan fungsi Bappeda sebagaimana di tetapkan dalam Peraturan daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Tekhnis Daerah Kabupaten Jeneponto. Dalam melaksanakan tugas pokok dan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jeneponto diatur dalam peraturan bupati Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Uraian tugas pokok, fungsi dan rincian tugas jabatan Dinas pendapatan pengelolaan keuangan dan aset daerah Kabupaten Jeneponto. Kedudukan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

B. Visi Dan Misi

1. Visi

MENINGKATKAN PENDAPATAN DAERAH DAN MEWUJUDKAN TATA KELOLA KEUANGAN DAN ASET YANG AKUNTABEL DAN BERKELANJUTAN

2. Misi

Adapun Misi DPPKAD Kabupaten Jeneponto antara lain sebagai berikut :

- a. DPPKAD Kabupaten Jeneponto adalah merupakan institusi yang merumuskan dan menyusun kebijakan pengelolaan keuangan daerah yang meliputi pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang tertuang di dalam Peraturan Daerah dan Peraturan/Keputusan Bupati.
- b. Pembina administrasi pengelolaan keuangan daerah yang strategis diartikan bahwa DPPKAD Kabupaten Jeneponto menjalankan fungsi PPKD, pembinaan administratif pengelolaan keuangan daerah yang didasarkan pada ketentuan dan peraturan yang berlaku, yang sangat menentukan kelancaran dan efektifitas kinerja birokrasi seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- c. Dalam mendukung Visi dan Misi Bupati Jeneponto adalah sebagai unsur pelaksana teknis operasional, yang mendukung dan mempercepat akselerasi pembangunan sebagaimana Visi dan Misi Bupati terpilih yang telah dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2014-2018.

C. Stuktur Organisasi

Struktur organisasi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Asset Daerah Kabupaten Jeneponto.



1. Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jeneponto

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 4 Tahun 2008 tentang pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Tekhnis Daerah Kabupaten Jeneponto serta kedudukan DPPKAD diatur dengan Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Jabatan Dinas Pendapatan Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah, yang menetapkan rincian tugas jabatan struktural Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jeneponto.

2. Uraian Tugas dan Fungsi Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jeneponto

Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, mempunyai tugas pokok membantu Bupati Jeneponto dalam memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan seluruh tugas penyelenggaraan kewenangan daerah dalam bidang pendapatan serta merumuskan kebijakan dibidang keuangan daerah dan penilaian atas pelaksanaannya, mengkoordinasikan kegiatan pengelolaan keuangan daerah seperti penganggaran, pelaksanaan, pelaporan, aset Daerah dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.

3. Tugas dan Fungsi Sekretariat DPPKAD Kabupaten Jeneponto

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris, mempunyai tugas pokok melaksanakan, mengelolah administrasi yang berhubungan dengan perencanaan, keuangan, administrasi umum dan kepegawaian serta pelaporan pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud sekretaris mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis administrasi umum dan kepegawaian, administrasi keuangan, program dan urusan rumah tangga;
- b. Penyelenggaraan Kebijakan administrasi administrasi umum dan kepegawaian, administrasi keuangan, program;

- c. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan Sub bagian;
- d. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi program kegiatan;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Uraian Sub Bagian Umum dan Kepegawaian DPPKAD Kabupaten Jeneponto

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian, mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang meliputi urusan surat-menyurat, administrasi kepegawaian, kearsipan, administrasi perjalanan dinas, urusan rumah tangga dan perlengkapan dinas; Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Kepala sub bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan dan Pelaksanaan kebijakan teknis sub bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Penyusunan dan Pelaksanaan program dan kegiatan sub bagian Umum dan Kepegawaian;
- c. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan pejabat non struktural dalam lingkup Sub bagian Umum dan Kepegawaian;
- d. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi program kegiatan sub bagian Umum dan Kepegawaian;

- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Uraian Sub Bagian Program DPPKAD Kab. Jeneponto

Sub Bagian Program dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian, mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan penyusunan program, perencanaan dan pengendalian, koordinasi, evaluasi dan pelaporan di Sub Bagian Program;

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Kepala sub bagian Bagian Program mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan dan Pelaksanaan kebijakan teknis sub bagian Program;
- b. Penyusunan dan Pelaksanaan program dan kegiatan sub bagian Program;
- c. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan pejabat non struktural dalam lingkup Sub bagian Program;
- d. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi program kegiatan sub bagian Program;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6. Uraian Sub Bagian Keuangan DPPKAD Kab. Jeneponto

Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian mempunyai tugas pokok mengelola administrasi keuangan meliputi penyusunan anggaran, pemamfaatan anggaran, penggunaan,

pertanggungjawaban dan laporan keuangan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala sub bagian Keuangan mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan kebijakan teknis sub bagian Keuangan;
- b. Penyusunan dan Pelaksanaan program dan kegiatan sub bagian Keuangan;
- c. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan pejabat non struktural dalam lingkup Sub bagian Keuangan;
- d. Pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan pejabat non struktural dalam lingkup sub bagian Keuangan;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

7. Uraian Tugas dan Fungsi Bidang Pendapatan DPPKAD Kab.Jeneponto

Bidang Pendapatan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan dan mengendalikan seluruh tugas penyelenggaraan keuangan daerah di bidang perpajakan, retribusi dan pendapatan lain-lain serta dana perimbangan pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Kepala Bidang Pendapatan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan teknis bidang Pendapatan;

- b. Penyelenggaraan program dan kegiatan bidang Pendapatan;
- c. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan kepala seksi dalam lingkup bidang Pendapatan;
- d. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi program kegiatan bidang Pendapatan;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

8. Uraian sub Bagian Seksi Pajak DPPKAD Kab. Jeneponto

Seksi Pajak dipimpin oleh seorang Kepala Seksi mempunyai tugas pokok melakukan perumusan kebijakan dan pembinaan, mengkoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan seksi pajak yang meliputi pendaftaran wajib pajak, penetapan wajib pajak serta penagihan pajak;

Dalam menyelenggarakan tugas Kepala seksi Pajak mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan program dan kegiatan seksi Pajak;
- b. Pelaksanaan program dan kegiatan seksi Pajak;
- c. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan dalam lingkup seksi Pajak;
- d. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi program kegiatan pejabat non struktural dalam lingkup seksi Pajak;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

9. Sub Bagian Seksi Retribusi DPPKAD Kab. Jeneponto

Seksi Retribusi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi mempunyai tugas pokok melakukan perumusan kebijakan dan pembinaan, mengkoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan penatausahaan Seksi Retribusi meliputi pendataan, perhitungan serta penagihan retribusi;

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana Kepala seksi Retribusi mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program dan kegiatan seksi Retribusi;
- b. Pelaksanaan program dan kegiatan seksi Retribusi;
- c. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan dalam lingkup seksi Retribusi;
- d. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi program kegiatan Retribusi;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

10. Seksi Pendapatan Lain-Lain dan Dana Perimbangan DPPKAD Kab. Jeneponto

Seksi Pendapatan Lain-lain dan Dana Perimbangan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi mempunyai tugas pokok mengolah data bagi hasil dan penerimaan lain-lain baik yang berupa dari pajak maupun non pajak meliputi perencanaan, pengkoordinasian, evaluasi dan laporan;

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala seksi Pendapatan Lain-lain dan Dana Perimbangan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program dan kegiatan seksi Pendapatan Lain-lain dan Dana Perimbangan;
- b. Pelaksanaan program dan kegiatan seksi Pendapatan Lain-lain dan Dana Perimbangan;
- c. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan dalam lingkup seksi Pendapatan Lain-lain dan Dana Perimbangan;
- d. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi program kegiatan Pendapatan Lain-lain dan Dana Perimbangan;
- e. Pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan pejabat non struktural dalam lingkup seksi Pendapatan lain-lain dan Dana Perimbangan.

11. Uraian Tugas dan Fungsi Bidang Anggaran DPPKAD Kab. Jeneponto

Bidang Anggaran dipimpin oleh seorang Kepala Bidang mempunyai tugas pokok menyampaikan arah dan kebijakan umum, prioritas dan plafon anggaran kepada setiap satuan kerja, mengkoordinasikan penyusunan anggaran satuan kerja dan pembahasannya oleh Tim Anggaran Eksekutif, mempersiapkan RAPBD dan melakukan revisi RAPBD sesuai persetujuan DPRD serta menyusun anggaran satuan kerja.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Kepala Bidang Anggaran mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan teknis bidang Anggaran;
- b. Penyelenggaraan program dan kegiatan bidang Anggaran;

- c. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan kepala seksi dalam lingkup bidang Anggaran;
- d. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi program kegiatan Anggaran;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

12. Uraian Seksi Penyusunan APBD DPPKAD Kab.Jeneponto

Seksi Penyusunan APBD dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Penyusunan APBD mempunyai tugas pokok menyusun APBD; Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana, Kepala seksi Penyusunan APBD mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program dan kegiatan seksi Penyusunan APBD;
- b. Pelaksanaan program dan kegiatan seksi Penyusunan APBD;
- c. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan dalam lingkup seksi Penyusunan APBD;
- d. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi program kegiatan Penyusunan APBD;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

13. Uraian Seksi Otorisasi DPA SKPD DPPKAD Kab.Jeneponto

Seksi Otorisasi DPA SKPD dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Otorisasi DPA SKPD mempunyai tugas pokok menyusun dan mengverifikasi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD; Dalam

menyelenggarakan tugas sebagaimana Kepala seksi Otorisasi DPA SKPD mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program dan kegiatan seksi Otorisasi DPA SKPD;
- b. Pelaksanaan program dan kegiatan seksi Otorisasi DPA SKPD;
- c. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan dalam lingkup seksi Otorisasi DPA SKPD;
- d. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi program kegiatan Otorisasi DPA SKPD;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi.

14. Uraian Seksi Perbendaharaan DPPKAD Kab. Jeneponto

Seksi Perbendaharaan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Perbendaharaan mempunyai tugas pokok menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM), pemeriksaan Surat Permintaan Pencairan (SPP), dan pembinaan administrasi pemegang kas (bendahara); Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Kepala seksi Perbendaharaan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program dan kegiatan seksi Perbendaharaan;
- b. Pelaksanaan program dan kegiatan seksi Perbendaharaan;
- c. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan dalam lingkup seksi Perbendaharaan;
- d. Pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan pejabat non struktural dalam lingkup seksi Perbendaharaan;

- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**15. Uraian Tugas dan Fungsi Bidang Akuntansi DPPKAD
Kab.Jeneponto**

Bidang Akuntansi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Akuntansi mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan administrasi akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas, akuntansi aset dan penyusunan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Jeneponto;

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Akuntansi mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan teknis bidang Akuntansi;
- b. Penyelenggaraan program dan kegiatan bidang Akuntansi;
- c. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan kepala seksi dalam lingkup bidang Akuntansi;
- d. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi program kegiatan Akuntansi;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**16. Seksi Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas DPPKAD
Kab.Jeneponto**

Seksi Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas dipimpin oleh seorang Seksi Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan administrasi penyusunan akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas; Dalam menyelenggarakan

tugas sebagaimana dimaksud Kepala seksi mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program dan kegiatan seksi Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas;
- b. Pelaksanaan program dan kegiatan seksi Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas;
- c. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan dalam lingkup seksi Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas;
- d. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi program kegiatan Seksi Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

17. Uraian Seksi Akuntansi Aset DPPKAD Kab. Jeneponto

Seksi Akuntansi Aset dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Akuntansi Aset mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan administrasi perhitungan akuntansi aset; Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Akuntansi Aset mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan teknis Seksi Akuntansi Aset;
- b. Penyelenggaraan program dan kegiatan bidang Seksi Akuntansi Aset;
- c. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan kepala seksi dalam lingkup bidang Akuntansi Aset;

- d. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi program kegiatan Seksi Akuntansi Aset;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

18. Uraian Seksi Penyusunan Laporan Keuangan DPPKAD Kab. Jeneponto

Seksi Penyusunan Laporan Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Penyusunan Laporan Keuangan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan akuntansi penyusunan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Jeneponto. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Kepala Seksi Penyusunan Laporan Keuangan mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan kebijakan teknis Seksi Penyusunan Laporan Keuangan;
- b. Penyelenggaraan program dan kegiatan bidang Seksi Penyusunan Laporan Keuangan
- c. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan kepala seksi dalam lingkup bidang Penyusunan Laporan Keuangan
- d. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi program kegiatan Seksi Penyusunan Laporan Keuangan;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

19. Uraian Tugas dan Fungsi Bidang Aset DPPKAD Kab. Jeneponto

Bidang Aset dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Aset

mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan administrasi perencanaan, kebutuhan barang, pemeliharaan, pelaporan, analisa dan penghapusan aset milik Pemerintah Kabupaten Jeneponto;

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Kepala Bidang Aset mempunyai fungsi ;

- a. Penyusunan kebijakan teknis Bidang aset
- b. Penyelenggaraan program dan kegiatan bidang Aset;
- c. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan kepala seksi dalam lingkup bidang Aset;
- d. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi program kegiatan Bidang Aset;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

20. Uraian Seksi Perencanaan Kebutuhan DPPKAD Kab. Jeneponto

Seksi Perencanaan Kebutuhan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Perencanaan Kebutuhan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan administrasi perencanaan, kebutuhan barang terhadap Aset Daerah; Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Kepala Seksi Perencanaan Kebutuhan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program dan kegiatan teknis Seksi Perencanaan Kebutuhan;
- b. Pelaksanaan program dan kegiatan seksi Perencanaan Kebutuhan;
- c. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program

dan kegiatan pejabat non struktural dalam lingkup Seksi Perencanaan Kebutuhan;

- d. Penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan pejabat non struktural dalam lingkup kegiatan Seksi Perencanaan Kebutuhan;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

21. Uraian Seksi Analisa Aset DPPKAD Kab. Jeneponto

Seksi Analisa Aset dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Analisa Aset mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan administrasi dan pengadaan penilaian aset daerah.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Kepala Seksi Analisa Aset mempunyai fungsi

- a. Penyusunan program dan kegiatan teknis Seksi Analisa Aset;
- b. Pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Analisa Aset;
- c. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan pejabat non struktural dalam lingkup Seksi Analisa Aset;
- d. Penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan pejabat non struktural dalam lingkup kegiatan Seksi Analisa Aset;

22. Uraian Seksi Penghapusan Aset DPPKAD Kab. Jeneponto

Seksi Penghapusan Aset dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Penghapusan Aset mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan administrasi dan mengadakan penilaian Aset daerah; Dalam

menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Kepala Seksi Penghapusan Aset mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan program dan kegiatan teknis Seksi Penghapusan Aset;
- b. Pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Analisa Aset;
- c. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan pejabat non struktural dalam lingkup Seksi Penghapusan Aset;
- d. Penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan pejabat non struktural dalam lingkup kegiatan Seksi Penghapusan Aset;

23. Uraian Tugas dan Fungsi Kelompok Jabatan Fungsional DPPKAD Kab. Jeneponto

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Kelompok Jabatan Fungsional dimaksud, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya;

- a. Setiap kelompok tersebut dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati;
- b. Jumlah jabatan fungsional tersebut ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
- c. Jenis jenjang jabatan fungsional tersebut ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Sistem Akuntansi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah

Sistem penerimaan PAD di DPPKAD Kabupaten Jeneponto dilaksanakan sesuai dengan mekanisme Permendagri No. 59 Tahun 2007 dalam menjalankan pembagian tugas dan fungsi masing-masing. Jaringan prosedur yang membentuk sistem penerimaan PAD di DPPKAD Jeneponto sebagai berikut:

- a. Fungsi pihak terkait yaitu PPK-SKPD, Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan dan BUD (Bank)
- b. Dokumen yang digunakan yaitu Surat Tanda Setor (STS), Surat Setoran Pajak (SSP), Surat Setoran Retribusi (SSR), Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) dan Nota Kredit Bank
- c. Catatan yang digunakan yaitu Buku Besar dan Buku Besar Pembantu
- d. Deskripsi Prosedur

Sesuai mekanisme Permendagri No. 59 Tahun 2007 penerimaan PAD Kabupaten Jeneponto dilaksanakan dengan tiga mekanisme/prosedur yaitu pembayaran langsung melalui Bendahara Penerimaan, penyetoran melalui Bendahara Penerimaan Pembantu, dan penyetoran melalui Bank Pemerintah yang ditunjuk (Kas Daerah).

Tabel 5.1
Sistem Penerimaan PAD DPPKAD

Pelaksanaan	Langkah	Aktivitas
PPKD	1	Menyerahkan SKP yang telah diterbitkan kepada Bendahara Penerimaan dan melakukan verifikasi pada saat penerimaan pendapatan.
Penggunaan Anggaran	2	Menyerahkan SKR yang telah diterbitkan kepada Bendahara Penerimaan pada saat Bendahara Penerimaan dan melakukan verifikasi pada saat penerimaan pendapatan
	3	Menerima dan mengesahkan Laporan Pertanggungjawaban Penerimaan melalui PPK-SKPD.
Wajib Pajak	4	Menyerahkan uang (setoran pajak/retribusi).
PPK-SKPD	5	Melakukan verifikasi harian atas kas penerimaan.

Sumber : DPPKAD Kabupaten Jeneponto

Tabel 5.1 menunjukkan bahwa sistem penerimaan PAD pada DPPKAD dilakukan oleh beberapa pelaksana dan dokumen yang digunakan yaitu SKP/SKR-Daerah, Surat Tanda Setoran (STS), Surat Tanda Bukti Pembayaran (STBP) / Bukti Lain yang Sah.

Untuk lebih jelas Sistem Akuntansi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Jeneponto dapat dilihat pada

Gambar berikut :

**Sistem Akuntansi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah
Kabupaten Jeneponto**



a. Perencanaan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Jeneponto

Untuk menuju otonomi daerah di Kabupaten Jeneponto, maka pengelolaan peningkatan Pendapatan Asli Daerah perlu semakin diintensifkan, agar tercapai keseimbangan antara pelaksana tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan serta dapat mendukung terciptanya aparat yang bersih dan bertanggungjawab. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang diperoleh pemerintah daerah dari berbagai sumber yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk membiayai pelaksanaan pemerintah di daerah. Kebijakan keuangan daerah berhubungan erat dengan kebijakan keuangan negara. Hubungan tersebut tidak hanya bersifat keuangan, tetapi juga berhubungan dengan faktor-faktor lain yang dapat dilihat dari tiga segi, yaitu penyelenggaraan pemerintahan di daerah berkenaan dengan hubungan itulah, maka diperlukan perencanaan.

Pendapatan Asli Daerah merupakan pencerminan terhadap pendapatan masyarakat, untuk itu perlu adanya kiat-kiat bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan potensi masyarakat dalam pengelolaan sumber-sumber pendapatan masyarakat. Meningkatnya pendapatan masyarakat jelas mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sekaligus menambah Pendapatan Asli Daerah. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah tentunya tidak terlepas dari kemampuan pemerintah dalam membina masyarakat dan unsur swasta dalam mewujudkan berbagai bidang usaha, untuk selanjutnya dapat

memberikan masukan terhadap daerah. Berdasarkan pandangan tersebut, menurut penulis bahwa Pendapatan Asli Daerah merupakan modal dasar bagi setiap daerah dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pembangunan, dan sekaligus merupakan suatu bukti terhadap tingginya kesadaran masyarakat dalam mendukung pemerintah dalam menggali sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah. Pasal 6 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah menentukan bahwa, pendapatan hasil pajak daerah terdiri dari:

- 1) Hasil pajak daerah
- 2) Hasil retribusi daerah
- 3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
- 4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah

Untuk memperoleh target Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari perencanaan yang lebih dipertanggungjawabkan, menurut Rasyak selaku Kepala Bidang Pendapatan DPPKAD Jenepono saat di temui di kantornya mengatakan bahwa.

Dalam merencanakan penerimaan PAD perlu untuk mempertimbangkan Keadaan sosial ekonomi dan tingkat kesadaran masyarakat selaku wajib bayar kemudian juga memperhatikan Kebijakan dibidang ekonomi dan moneter. *(Wawancara pada Tanggal 16 Mei 2017)*

Dari wawancara diatas menekankan bahwa perlunya untuk mempertimbangkan beberapa hal dalam membuat perencanaan PAD agar dapat memaksimalkan penerimaan dalam menjaring PAD dan

dapat menyesuaikan dengan kebijakan nasional ekonomi serta memperhatikan keadaan sosial dan tingkat kesadaran masyarakat di daerah agar masyarakat sadar akan pentingnya wajib pajak. Dari wawancara diatas juga diperkuat oleh Syamsuddin Kepala Staf Pajak DPPKAD Jeneponto saat di temui di ruangnya menambahkan bahwa:

Dalam perencanaan perlu memperhitungkan berbagai faktor. Faktor-faktor tersebut adalah Realisasi penerimaan pendapatan dari tahun anggaran yang lalu dan Kemungkinan pencarian tunggakan tahun-tahun sebelumnya yang diperkirakan dapat ditagih serta Kemungkinan adanya perubahan penyesuaian tarif dan penyempurnaan sistem pungutan yang dapat mempengaruhi pendapatan. (*wawancara pada tanggal 18 Mei 2017*)

Berdasarkan wawancara diatas menjelaskan bahwa anggaran pendapatan asli daerah tahun lalu menjadi faktor penting dalam membuat perencanaan agar dapat memperhitungkan pendapatan yang akan terjaring berdasarkan hasil evaluasi dengan menyempurnakan sistem pungutan yang akan dilaksanakan agar dapat mempengaruhi peningkatan pendapatan yang akan dilaksanakan.

Keuangan daerah merupakan salah satu dasar kriteria untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengurus rumah tangga sendiri, Maka pendapatan asli daerah PAD menjadi sumber keuangan paling utama selain jenis penerimaan daerah lainnya. isyarat bahwa pendapatan asli daerah menjadi bagian sumber keuangan terbesar pada pelaksanaan otonomi daerah menunjukkan bahwa PAD merupakan tolak ukur terpenting bagi kemampuan daerah dalam

mewujudkan dan menyelenggarakan pemerintahan. PAD merupakan sumber penerimaan dan pendapatan murni bagi daerah.

Dari hasil wawancara jelas adanya penekanan terhadap penerimaan PAD. Pemerintah daerah dalam hal ini dinas pendapatan Kabupaten Jenepontoberusaha menggali dan mengembangkan potensi penerimaan daerah khususnya untuk meningkatkan penerimaan PAD melalui dinas pengeloan, yang kemudian diatur Berdasarkan peraturan daerah no 17 tahun 2006 tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah, maka DPPKAD memiliki peran penting bagi daerah dalam mengelola, menggali, menerima keuangan terhadap kebutuhan daerah.

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset dipimpin oleh Kepala Dinas dan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan rumah tangga Pemerintahan Daerah dan tugas pembantuan di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah.

Sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jeneponto terdiri atas beberapa jenis pendapatan, diantaranya adalah:

Tabel 5.2
Jenis penerimaan Pendapatan Asli Daerah

No	Jenis Pendapatan	Jenis Pajak
1	Hasil Pajak Daerah	1. Pajak Hotel 2. Pajak Restoran 3. Pajak Hiburan 4. Pajak Reklame 5. Pajak Penerangan sJalan 6. Pajak pengambil bahan galian golongan C 7. Pajak Bumi dan Bangunan
2	Hasil Retribusi Daerah	1. Retribusi Jasa Umum 2. Retribusi Jasa Usaha
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	1. Bagian Laba atas penyertaan Modal pada Perusahaan milik pemerintah/BUMN 2. Bagian Laba atas penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Swasta
4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	1. Hasil Penjualan Aset Daerah yang tidak Dipisahkan 2. Penerimaan Jasa Giro Pendapatan Bunga 3. Deposito Tuntutan Ganti Kerugian Daerah 4. Pendapatan dari Pengembalian 5. Lain-lain PAD

Sumber : DPPKAD Kabupaten Jeneponto

Berdasarkan tabel diatas sumber penerimaan dari pendapatan asli daerah terbagi menjadi empat pendapatan yang masing-masing memiliki pembagian pajak yang menjadi sumber kas keuangan daerah

yang dikelola langsung oleh daerah sesuai potensi kekayaan dimiliki daerah.

Dari hasil analisis diatas, sangat jelas bahwa Hasil retribusi daerah merupakan salah satu pendapatan pajak yang paling besar berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan asli daerah diluar dari pendapatan lainnya yang turut berkontribusi dalam peningkatan pendapatan asli daerah.

b. Pelaksanaan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Jeneponto

Berdasarkan sumber penerimaan pendapatan asli daerah yang berasal dari potensi dimiliki daerah maka sumber penerimaan tersebut selanjutnya akan dilaksanakan melalui proses penerimaan pajak.

Penerimaan kas pendapatan asli daerah dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan bertindak sebagai kordiantor, kordinasi yang dilakukan berdasarkan atas peraturan daerah nomor 17 tahun 2006 pada pasal 5 ayat 1 poin b tentang kordinasi kepada tiap SKPD yang memiliki potensi sumber daya, dengan melalui bendahara penerimaan yang berada disetiap SKPD yang selanjutnya dilakukan penyetoran ke Kas daerah, hasil penyetoran tersebut kemudian akan dilaporkan kembali ke Dinas PPKAD untuk dilakukan proses administrasi . Dalam pelaksanaan penerimaan pendapatan asli daerah DPPKAD memiliki peranan penting dalam melaksanakan hal tersebut demi terlaksananya pengelolaan pemerintahan yang otonom.

Tabel 5.3
Target Penerimaan Pendapatan Asli Dari Daerah
Dari Tahun 2014-2016

No	Tahun	Target Penerimaan PAD
1	2014	21.680.093.000,00
2	2015	20.474.666.8000,00
3	2016	16.285.472.2000,00

Sumber : DPPKAD Kab. Jeneponto

Setelah pelaksanaan pendapatan asli daerah yang dilaksanakan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dan telah dilakukan proses administratif maka proses selanjutnya penerimaan Pendapatan asli daerah dijumlahkan bersama dana perimbangan dari pusat berupa Dana Alokasi umum, dana alokasi Khusus dan Pendapatan daerah yang sah menjadi Pendapatan Daerah Kabupaten Jeneponto.

Tabel 5.4
Realisasi Pendapatan Asli Daerah dari Tahun 2014-2016

No	Uraian	Tahun realisasi		
		2014	2015	2016
	Pedapatan Asli Daerah	21.680.093.000,00	45.690.837.809,00	64.000.145.600,00
1	Pajak Daerah	3.314.000.000,00	8.728.179.053,00	11.581.200.360,00
2	Retribusi Daerah	5.606.593.000,00	26.681.827.012,00	37.475.145.600,00
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	3.634.000.000,00	4.208.140.399,00	5.034.000.000,00
4	Lain-lain PAD Yang Sah	9.125.500.000,00	6.407.144.145,00	9.909.799.640,00

Sumber : DPPKAD Kabupaten Jeneponto

Berdasarkan tabel diatas realisasi pendapatan asli daerah dari tahun 2013-2015 menunjukkan bahwa peningkatan pendapatan asli

daerah terus meningkat, selisi jumlah pendapatan dari tahun 2014 ke tahun 2015 adalah 47% jadi peningkatan pendapatan asli daerah dari tahun 2014-2015 sebesar Rp.24,010,744,809, terus peningkatan di tahun 2015 sampai 2016 adalah 71%, peningkatan tersebut memiliki selisi sebesar Rp.18,309,307,791. Meski Peningkatan pendapatan dari tahun 2014-2015 lebih tinggi dibandingkan dengan pada tahun 2014-2016, ini menunjukkan peningkatan pendapatan asli daerah mulai dari tahun 2014-2016 tetap mengalami peningkatan. Dari tabel diatas menunjukkan semua pajak pendapatan asli daerah telah berkontribusi terhadap peningkatan PAD dan yang paling memberikan kontribusi terbesaryaitu hasil retribusi daerah, walaupun demikian pada tahun 2014 hasil retribusi daerah masih sangat rendah dibandingkan dengan tahun 2015 dan tahun 2016. Hasil retribusi daerah tersebut berupa:

- 1) Retribusi Jasa Umum :
 - a) Retribusi pelayanan pasar
 - b) Retribusi pelayanan administrasi
 - c) Retribusi Pelayanan Kesehatan
 - d) Retribusi Pelayanan Kesehatan RSUD
 - e) Retribusi Pelayana Administrasi RSUD
 - f) Retribusi pelayanan Persampahan
 - g) Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran
 - h) Retribusi penggantian biaya cetak peta
 - i) Retribusi pelayanan parker ditepi jalan

- j) Retribusi pengujian kendaraan bermotor
 - k) Retribusi penengdalai Menara telekomunikasi
 - l) Retribusi kontribusi dana sosial & SHU
 - m) Retribusi pelayanan administrasi pertambangan
- 2) Retribusi Jasa Usaha :
- a) Retribusi pemakaian kekayaan daerah/sewa rumah dinas
 - b) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah/ Sewa Gedung
 - c) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah/sewa Alat Berat
 - d) Retribusi Tempat Parkir Khusus
 - e) Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan
 - f) Retribusi Penjualan Produksi Usaha daerah
 - g) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Sewa Gedung & Rumah Dinas)
 - h) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Sewa Aula)
 - i) Retribusi Penjualan Hasil Pertanian
 - j) Retribusi Tempat rekreasi dan Olahraga
 - k) Retribusi Penjualan Bibit
 - l) Retribusi Rumah Potong Hewan
 - m) Retribusi Penjualan Produksi Usaha daerah /Perkebunan
 - n) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Perikanan)
 - o) Retribusi Tempat Pelelangan
 - p) Retribusi Penjualan Hasil Perikanan
 - q) Retribusi Garam Retribusi Izin Usaha Pertambangan

3) Retribusi Perizinan Tertentu

- a) Retribusi Izin Trayek
- b) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
- c) Retribusi SITU/HO
- d) Retribusi Izin Usaha Perikanan

Dari hasil analisis diatas, sangat jelas bahwa Hasil retribusi daerah merupakan salah satu pendapatan pajak yang paling besar berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan asli daerah diluar dari pendapatan lainnya yang turut berkontribusi dalam peningkatan pendapatan asli daerah.

Tabel 5.5
Rincian Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jeneponto
Tahun 2014-2016

Pendapatan Asli Daerah	Tahun Realisasi		
	2014	2015	2016
Hasil Pajak Daerah	3.314.000.000,00	8.728.179.053,00	11.581.200.360,00
Hotel bintang dua	13,540,800,00	25.870.053,00	12,500,000,00
WismaPariwisata	-	-	12,500,000,00
Rumah makan	19,290,300,00	23.260.000,00	15,000,000,00
Pagelaran Kesenian /Tari/music/busana			5,000,000,00
Reklame Papan /Bill Board/Videotron /megatron	147,680,544,00	177.463.670,00	270,000,000,00
Reklame kain	5,400,240,00	-	-
Pajak penerangan jalan PLN	1,313,975134	4.856.683.804,00	4,700,000,000,00
Batu gunung/kali	130,920,560,00	212.302.823,25	175,000,000,00
Pasir ayak	-	-	18,750,000,00
Pasir urung/timbunan	9,860,500,00	8.735.489,50	22,500,000,00

Pendapatan Asli Daerah	Tahun Realisasi		
	2014	2015	2016
Timbunan tanah	20,790,668,00	111.771.677,00	3,750,000,00
Batu Bata	15,379,664,00	19.654.520,00	11,250,000,00
Krikil sungai	5,998,215,00	1.697.413,25	41,250,000,00
Pasir pasangan	98,233,093,00	100.625.273,75	75,000,000,00
Pasir batu (sirtu)	46,932,626,00	54.553.883,75	52,500,000,00
Batu Pecah	10,798,254,00	14.554.889,50	
Pajak parker			25,000,000,00
Pajak Bea Perolehan Ha katas Tanah dan Bangunan	82,970,550,00	88.384.285,00	500,000,000,00
Pajak bumi dan bangunan	1,780,599,620	3.032.621.271,00	5,641,200,360,00
Hasil Retribusi Daerah	5.606.593.000,00	26.681.827.012,00	37.475.145.600,00
Retribusi pelayanan pasar	280,500,978,00	328.153.000,00	1,000,000,000,00
Retribusi pelayanan administrasi			-
Pelayanan Kesehatan	1,537,336,527,00	13.653.928.000,00	16,513,644,700,00
Pelayanan Kesehatan RSUD	2,508,346,881,00	11.356.777.612,00	19,040,519,111,00
Pelayanan Administrasi RSUD	2,220,490,00	3.799.000,00	-
Pelayanan Persampahan	22,150,220,00	20.875.000,00	140,000,000,00
pemeriksaan alat pemadam kebakaran			5,000,000,00
penggantian biaya cetak peta			5,000,000,00
pelayanan parker ditepi jalan umum	57,000,500,00	70.570.400,00	150,000,000,00
pengujian kendaraan bermotor	24,250,330,00	31.781.000,00	50,000,000,00
pengendalian Menara telekomunikasi	20,500,420,00	15.000.000,00	150,000,000,00

Pendapatan Asli Daerah	Tahun Realisasi		
	2014	2015	2016
kontribusi dana sosial & SHU	25,002,487,00	30.018.000,00	40,379,000,00
pelayanan administrasi pertambangan	-	-	-
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah/sewa rumah dinas	11,200,000,00	6.300.000,00	34,800,000,00
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah/ Sewa Gedung	18,500,000,00	10.438.500,00	-
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah/sewa Alat Berat	37,840,928,00	40.000.000,00	43,700,000,00
Retribusi Terminal	100,007,450,00	129.520.000,00	115,000,000,00
Retribusi Tempat Parkir Khusus	14,250,449,00	18.103.300,00	75,000,000,00
Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	9,801,502,00	10.494.000,00	20,000,000,00
Retribusi Penjualan Produksi Usaha daerah/hasil pertanian	-	5.150.000,00	17,250,000,00
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Sewa Gedung & Rumah Dinas)	28,220,500,00	10.430.000,00	100,000,000,00
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Sewa Aula)	25,100,440,00	30.000.000,00	50,000,000,00
Retribusi Penjualan Hasil Pertanian	12,989,778,00	11.500.000,00	17,250,000,00
Retribusi Tempat rekreasi dan Olahraga	5,657,500,00	2.900.000,00	50,000,000,00
Retribusi Penjualan Bibit	-	-	20,000,000,00
Retribusi Rumah	115,998,354,00	126.240.000,00	-

Pendapatan Asli Daerah	Tahun Realisasi		
	2014	2015	2016
Potong Hewan			
Retribusi Penjualan Produksi Usaha daerah /Perkebunan	32,005,249,00	33.660.000,00	-
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Perikanan)	10,000,000,00	10.000.000,00	50,000,000,00
Retribusi Tempat Pelelangan	2,800,650,00	-	-
Retribusi Penjualan Hasil Perikanan	-	-	10,000,000,00
Retribusi Garam	-	-	-
Retribusi Izin Usaha Pertambangan	-	-	-
Retribusi izin trayek	-	4.025.000,00	50,000,000,00
Retribusi izin mendirikan bangunan	324,909,957,00	252.349.200,00	2,828,249,826,00
Retribusi SITU/HO	349,598,445,00	469.215.000,00	391,590,000,00
Retribusi izin usaha perikanan	-	600.000,00	10,000,000,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	3.634.000.000,00	4.208.140.399,00	5.034,000,000,00
Bank Sul-Sel	3.634.000.000,00	4.208.140.399,00	5.000,000,000,00
PT.ItabelAlamPulu	-	-	34,000,000,00
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	9.125.500.000,00	6.407.144.145,00	9.909.799.640,00
Hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan	2,193,827,200,00	173.810.400,00	2,620,000,000
Jasa kas daerah	2,569,524,900,00	2.645.065.571,00	2,000,000,000
Rekening deposito bank sulsel	1,399,150,995,00	1.251.071.055,00	2,000,000,000
Kerugian uang	1,370,059,287,00	1.577.189.347,00	1,099,799,640

Pendapatan Asli Daerah	Tahun Realisasi		
	2014	2015	2016
Kerugian barang	100,500,980,00	-	50,000,000
Pendapatan dari pengembalian	945,997,234,00	760.007.772,00	2,100,000,000
Pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran gaji dan tunjangan	90,787,387,00	129.398.521,00	100,000,000
Lain-lain PAD	459,652,026,00	630.609.251,00	2,000,000,000
Jumlah	21.680.093.000,00	45.690.837.809,00	64.000.145.600,00

Sumber :DPPKAD Kabupaten Jeneponto

Rincian pendapatan asli daerah Kabupaten Jeneponto dari tahun 2014-2016 diatas memperjelas terjadinya peningkatan setiap tahun dan yang paling pesat peningkatannya adalah dari hasil retribusi pelayanan RSUD Lanto Dg. Pasewang sebagai aset daerah dibandingkan dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki Kabupaten Jeneponto seperti penjualan hasil pertanian, retribusi garam, perikanan hasil laut. Jadi secara keseluruhan aset daerah yang dimiliki atas pelayanan jasa dan tempat memiliki retribusi besar dalam meningkatkan pendapatan asli daerah di Kabupaten Jeneponto.

2. Sistem Akuntansi Pemanfaatan Pendapatan Asli Daerah

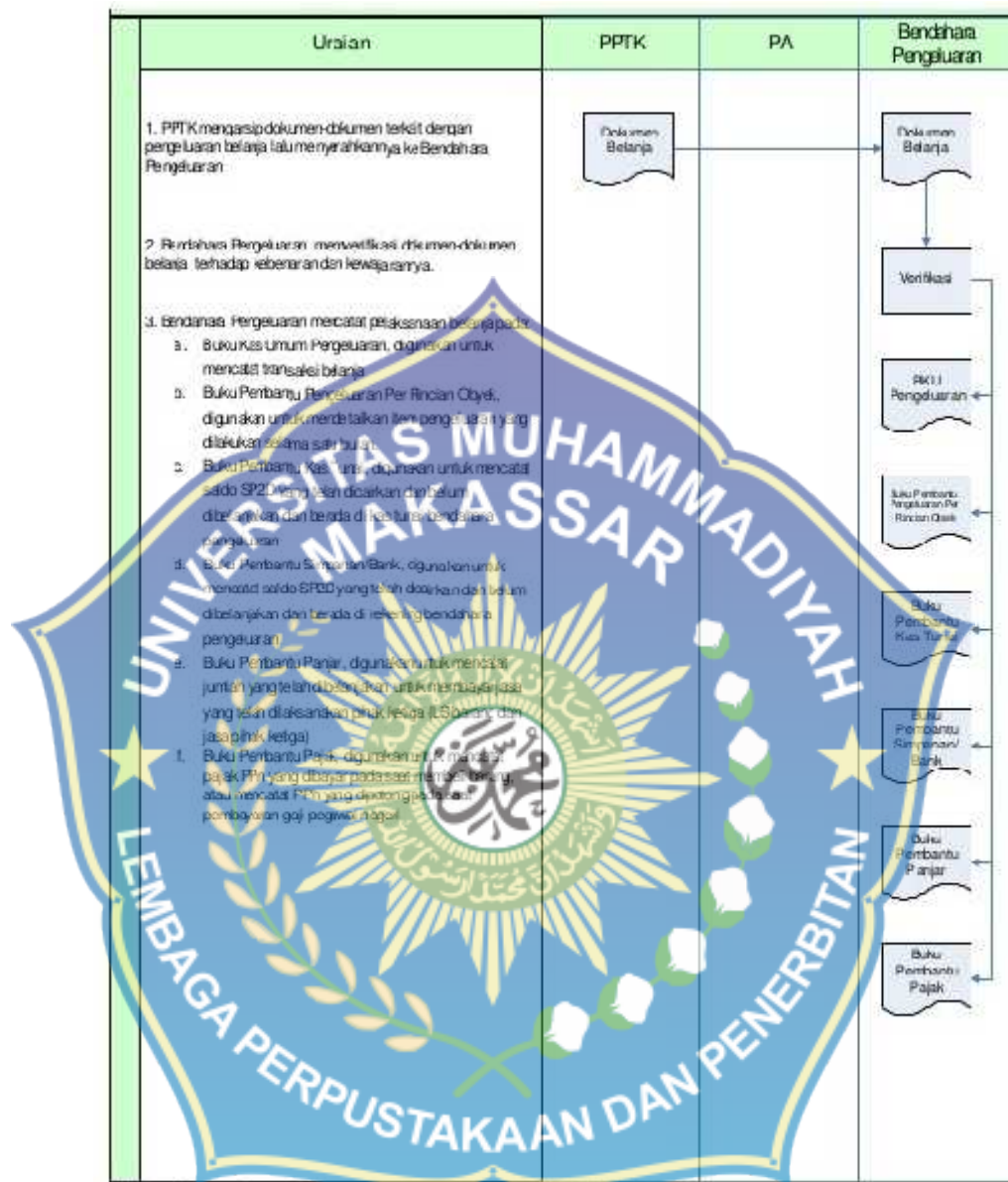
Sesuai dengan prinsip kesatuan bahwa pemerintah daerah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari pemerintah pusat, atas dasar tersebut maka kemandirian daerah dalam rumah tangganya tidak ditafsirkan bahwa setiap pemerintah daerah harus dapat membiayai seluruh pengeluaran dari Pendapatan Asli Daerah (PAD-nya) sebagai tindak lanjut dari pemberian otonomi kepada daerah agar dapat mengatur

dan mengurus rumah tangganya sendiri dalam meningkatkan daya guna dan hasil guna dalam pelaksanaan pemerintah di daerah. Maka upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah mutlak diperlukan untuk mengantisipasi pelaksanaan otonomi yang nyata dan bertanggung jawab.

Pemerintah Kabupaten Jeneponto dalam usaha untuk mengembangkan dan membangun daerahnya telah berupaya untuk meningkatkan sumber-sumber pendapatan asli daerahnya sesuai potensi yang dimiliki. Upaya tersebut dilakukan dengan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber PAD, agar peningkatan target setiap tahunnya dapat diikuti dengan pencapaian realisasi secara konsisten. Untuk lebih jelas perhatikan gambar dibawah ini



Gambar 4 Sistem Pemanfaatan Pendapatan Asli Daerah



Pengeluaran pemerintah yang meningkat dapat menciptakan efek pengganda. Jika pengeluaran pemerintah menyebabkan pengangguran untuk mendapatkan pekerjaan maka mereka akan memiliki pendapatan lebih untuk menghabiskan mengarah ke lebih meningkatkan permintaan agregat. (Pekerja konstruksi misalnya dipekerjakan oleh peningkatan

pengeluaran pemerintah di pub dan transportasi, menyebabkan sektor-sektor ekonomi lainnya untuk memperoleh manfaat dari pengeluaran pemerintah). Dalam situasi ini kapasitas cadangan dalam perekonomian, pengeluaran pemerintah dapat menyebabkan peningkatan akhir lebih besar dalam PDB.

Sumber keuangan daerah untuk penyelenggaraan kegiatan pemerintah adalah dengan pendapatan asli daerah. Pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang harus digali dan ditingkatkan secara terus menerus oleh pemerintah Kabupaten Jeneponto dalam mengurus rumah tangganya dan juga untuk meningkatkan pembangunan diberbagai sektor. Dengan demikian belanja pembangunan juga terus meningkat berdasarkan kebutuhan daerah. Berikut belanja modal pembangunan jalan dan irigasi air dari tahun 2014 sampai tahun 2016.

Tabel 5.6

Belanja Modal Pembangunan Kabupaten Jeneponto

Tahun Anggaran 2014-2016

Uraian	2014	2015	2016
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	17,355,249,500	26,047,787,989	96,923,069,485
Belanja Modal Pengadaan Jalan Setapak	3,905,841,000	5,579,122,700	2,642,636,300
Belanja Modal Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan (rutin / periodic)	2,890,480,405	4,658,281,650	15,161,284,000
Belanja Modal Perintisan / Pembangunan Jalan	3,590,411,599	3,621,680,500	474,597,000

Belanja Modal Peningkatan Jalan	2,490.845,910	5,093,840,000	1,547,480,000
Belanja modal Pembangunan Bangunan Perlengkap jalan		545,813,000	3,585,976,000
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi kanal Permukaan Belanja Modal	5,948,746,834	7,334,859,692	7,751,490,500
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan			3,986,367,000
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan irigasi	6,894,284,550	4,528,530,545	34,596,579,424
Belanja modal Pengadaan Konstruksi jaringan air bersi / air minum	8,893,284,375	12,650,074,946	11,606,951,394
Belanja Modal sumur	3,459,023,415	5,527,162,676	2,561,194,163
Jumlah	50,114,162,383	75,773,900,335	178,459,615,903

Sumber :DPPKAD Kabupaten Jeneponto

Dari tabel diatas kebutuhan terhadap belanja daerah dalam hal ini belanja modal terhadap Pengadaan kontruksi jalan dan irigasi air terus menunjukkan peningkatan mengingat kebutuhan juga bertambah. Bagian terbesar dari belanja pembangunan daerah Kabupaten Jeneponto adalah sektor pengadaan konstruksi jalan. Pada tahun anggaran 2014 biaya yang dikeluarkan untuk membiayai sektor pengadaan konstruksi jalan sebesar Rp. 17,355,249,500, tahun anggaran 2015 sebesar Rp. 26,047,787,989, tahun anggaran 2016 sebesar Rp.26,047,787,989, kemudian penganggaran terbesar ke dua dalam belanja pembangunan adalah pada sektor pengadaan konstruksi jaringan air pada tahun 2016 sebesar Rp. 34,596,579,424 yang sebelumnya pada tahun 2014 sebesar Rp. 6,894,284,550 dan pada tahun

2015 sebesar Rp. 4,528,530,545. Maka dapat kita lihat bahwa semakin meningkat jumlah pendapatan asli daerah maka semakin meningkat pula jumlah belanja pembangunan daerah yang dikeluarkan pemerintah Kabupaten Jeneponto. Jumlah belanja pembangunan daerah Kabupaten Jeneponto terus meningkat menunjukkan keadaan daerah Kabupaten Jeneponto mengalami perkembangan namun peningkatan belanja pembangunan tersebut tidak berbanding lurus terhadap jumlah peningkatan PAD untuk membiayai besaran dari kebutuhan pembangunan di Kabupaten Jeneponto, ini bisa dilihat dari besaran-besaran jumlah kebutuhan pembangunan diatas bahwa peningkatan belanja pembangunan dibarengi dengan peningkatan jumlah PAD tetapi besaran PAD tersebut masih jauh dari kebutuhan yang akan dibiayai.

Besaran belanja pembangunan daerah yang mengalami peningkatan secara berturut-turut tidak terlepas dari pengaruh dana perimbangan dari pusat yang bertambah dan juga dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Jeneponto, pendapatan dari pemerintah pusat berupa dana perimbangan di pemerintah daerah di Indonesia merupakan sumber pendapatan dalam APBD, terdapat hubungan yang kuat antara dana perimbangan dan belanja pembangunan.

Dalam pelaksanaan otonomi daerah dengan prinsip desentralisasi hubungan antar pemerintah pusat dan daerah, Sesuai dengan prinsip kesatuan bahwa pemerintah daerah merupakan yang tidak terpisahkan dari pemerintah pusat atas dasar tersebut maka kemandirian daerah dalam

mengelola rumah tangganya tidak ditafsirkan bahwa setiap pemerintah daerah harus dapat membiayai seluruh pengeluaran dari Pendapatan Asli Daerahnya (PAD), maka untuk menutupi besaran PAD pendapatan asli daerah (PAD) terhadap besarnya belanja pembangunan daerah adalah dengan bantuan dari Dana Perimbangan yang berasal dari Pemerintah pusat berupa Dana APBN berupa DAU (Dana Alokasi Umum) dan DAK (Dana Alokasi Khusus) sebagai bagian dari hubungan antara pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Peningkatan pengeluaran pemerintah melalui pajak yang lebih tinggi akan menyebabkan alokasi sumber daya yang lebih efisien karena pemerintah cenderung kurang efektif dalam pengeluaran uang. Pengeluaran pemerintah yang cenderung semakin meningkat ini seiring dengan meningkatnya juga Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jeneponto dari tahun ke tahun pembiayaan pembangunan daerah Kabupaten Jeneponto oleh pemerintah daerah semakin meningkat sehingga memicu meningkatnya pengeluaran pemerintah di Kabupaten Jeneponto.

3. Efektivitas Penerimaan dan Pemanfaatan Asli Daerah (PAD)

Kinerja pemerintah Kabupaten Jeneponto dalam melakukan pemungutan PAD dapat dikategorikan efektif apabila realisasi penerimaan 10 pajak dan retribusi daerah mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun kriteria penilaian efektivitas pengelolaan pajak dan retribusi daerah terhadap penerimaan PAD Kabupaten Jeneponto, sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007.

Dalam pemaparan “Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Jeneponto” yang disampaikan dalam target dan realisasi pendapatan daerah kabupaten jeneponto dari tahun 2014-2016 realisasi PAD tahun 2014 sebesar Rp21.680.093.000,00 dengan targetRp. 21.680.093.000,00 dan pada tahun 2015 realisasi PAD sebesar Rp.46.025.290.609,00 dengan target Rp.20.474.666.800,00 kemudian pada tahun 2016 terjadi peningkatan pendapatan PAD sebesar Rp. 64.000.145.600,00 dengan target Rp.16.285.472.200,00. Dari tiga tahun terakhir ini terus terjadi peningkatan pendapat asli daerah, ini membuktikan bahwa kemampuan pemerintah meningkatkan kemampuan penerimaannya dalam mengelolah kekayaan daerah dapat menjadikan pendapatan asli daerah sebagai pendapatan keuangan yang tinggi dalam menyelenggarakan pemerintahan yang kian terus meningkat dari tahun ke tahun dapat berjalan dengan baik.

Efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Kegiatan oprasional dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan. Untuk mengetahui efektivitas penerimaan PAD Kabupaten Jeneponto tahun 2014-2016 dapat di lihat dari efektivitas pengelolaan pajak dan retribusi daerah karena pajak dan retribusi merupakan sumber PAD terbesar di Kabupaten Jeneponto. PAD yang direncanakan dibandingkan dengan anggaran yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah yang dapat dihitung dengan membandingkan antara realisasi penerimaan PAD

terhadap penerimaan PAD yang ditetapkan, maka data yang dikumpulkan dalam penelitian ini akan dianalisis dengan rasio efektivitas dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Rasio Efektivitas PAD} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Target Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

1. Tahun 2014

$$\text{Rasio Efektivitas PAD} = \frac{459.652.026,00}{21.680.093.000,00} \times 100\% = 23\%$$

2. Tahun 2015

$$\text{Rasio Efektivitas PAD} = \frac{630.609.251,00}{20.474.666.800,00} \times 100\% = 30\%$$

3. Tahun 2016

$$\text{Rasio Efektivitas PAD} = \frac{2.000.000.000,00}{16.285.472.200,00} \times 100\% = 122\%$$

Tabel 5.7
Hasil Analisis Efektivitas Penerimaan Dan Pemanfaatan PAD

Tahun	Target PAD	Raealisasi	presentase	Criteria
2014	21.680.093.000,00	459.625.026	23%	Kurang Efektiv
2015	20.474.666.800,00	630.609.251,00	30%	Cukup Efektiv
2016	16.285.472.200,00	2.000.000.000,00	122%	Sangat Efektiv

Berdasarkan hasil penelitian efektivitas pemungutan PAD di Kabupaten Jeneponto tahun 2014-2016 dapat dijelaskan bahwa efektivitas pemungutan PAD di Kabupaten Jeneponto pada tahun 2014 mencapai

23% menunjukkan bahwa kurang Efektif kemudian pada tahun 2015 mencapai 30% menunjukkan bahwa cukup efektif dan pada tahun 2016 mencapai 122% menunjukkan bahwa sangat efektif jadi efektivitas pemungutan PAD Kabupaten Jeneponto pada tahun 2014-2016 tergolong kategori efektif dengan rata-rata 93,6%.

B. Pembahasan

1. Sistem Akuntansi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah

Sistem Akuntansi penerimaan kas digunakan untuk mencatat seluruh transaksi penerimaan kas. Berdasarkan PERMENDAGRI No. 59 Tahun 2007 pada surat edaran tentang sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah yang berisi ketentuan sistem dan prosedur penerimaan kas, pelaksanaan penerimaan PAD disetor ke rekening kas umum daerah pada bank pemerintah yang ditunjuk dan kemudian bank mengirim nota kredit sebagai pemberitahuan atas setoran tersebut ke fungsi yang melaksanakannya. Dalam menjalankan sistem penerimaan PAD pada DPPKAD membagi tugas dan tanggung jawab kedalam beberapa fungsi Pengguna Anggaran, PPK-SKPD melalui Bendahara Penerimaan, Bank, Bidang Pembukuan. Wajib Pajak/retribusi menyetor uang (setoran pajak/retribusi). Setelah melakukan verifikasi, Bendahara Penerimaan mengeluarkan Surat Tanda Bukti Pembayaran (STBP). Kemudian Bendahara Penerimaan menyiapkan Surat Tanda Setor (STS). Setelah itu Bendahara penerimaan menerima uang dari wajib pajak/retribusi akan menyetor uang ke bank yang ditunjuk pemerintah (Bank SULSELBAR)

beserta STS. Hasil penyetoran tersebut kemudian ditampung dalam rekening kas daerah. Selanjutnya bank akan memberitahukan hasil penyetoran tersebut ke PPK-SKPD melalui Bendahara Penerimaan disertai Nota Kredit dan STS yang telah diotorisasi. Apabila pembayaran dilakukan oleh wajib pajak/retribusi langsung ke kas daerah (Bank SULSELBAR), maka oleh kas daerah dibuatkan slip setoran sebanyak 2 lembar yang diserahkan kepada wajib pajak/retribusi. Oleh wajib pajak/retribusi salah satunya diserahkan kepada bendahara penerimaan, bendahara penerimaan membuat surat tanda bukti pembayaran dan menyerahkan kepada wajib pajak/retribusi. Selanjutnya bank membuat nota kredit dan menyampaikannya kepada BUD.

Jika pembayaran dilakukan wajib pajak/retribusi melalui bendahara penerimaan pembantu, maka alurnya sama dengan pembayaran melalui bendahara penerimaan, namun seluruh bukti penerimaan dan bukti penyetoran tersebut dibuat Surat Pertanggungjawaban (SPJ) oleh bendahara penerimaan pembantu dan diserahkan ke bendahara penerimaan paling lambat 5 bulan berikutnya. Bendahara penerimaan pembantu dibutuhkan karena obyek pendapatan daerah tersebar atas pertimbangan kondisi geografis wajib pajak/retribusi tidak mungkin membayar kewajibannya langsung pada badan atau lembaga keuangan yang bertugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi bendahara penerimaan maka ditunjuklah bendahara penerimaan pembantu.

2. Sistem Akuntansi Pemanfaatan Pendapatan Asli Daerah

Kebijakan yang dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah memerlukan perhatian terutama dalam hal pendistribusian anggaran, sehingga dapat merangsang terciptanya sumber-sumber pendapatan baru bagi daerah, salah satu sudut pandang kebijakan yang dapat dilakukan melalui kebijakan pengeluaran pemerintah daerah dalam hal pengelolaan keuangan yang efisien dan efektif adalah pendistribusian pengeluaran yang merata.

Pengeluaran konsumsi pemerintah meliputi seluruh pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini adalah pemerintah Kabupaten Jeneponto dalam rangka penyelenggaraan kegiatan administrasi pemerintahan. Nilai output akhir pemerintah yang terdiri dari pembelian barang dan jasa yang bersifat rutin seperti pembayaran gaji pegawai dan perkiraan penyusutan barang modal pemerintah. Besarnya proporsi tersebut memberikan suatu petunjuk bahwa pembangunan perekonomian daerah sangat dipengaruhi oleh posisi anggaran pemerintah pusat. Permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah pusat terkait dengan anggarannya, akan langsung berpengaruh terhadap perekonomian daerah. Pengaruh pemerintah pusat terhadap daerah berjalan melalui mekanisme perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah yaitu melalui dana perimbangan dan transfer pemerintah pusat kepada daerah.

Belanja Daerah, dirinci menurut organisasi, fungsi dan jenis belanja terdiri dari :

a. Belanja Rutin :

- 1) Administrasi Umum;
 - a) Belanja Pegawai;
 - b) Belanja Barang;
 - c) Belanja Pemeliharaan;
 - d) Belanja Perjalanan Dinas.
- 2) Operasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana.

b. Belanja Pembangunan :

- 1) Publik;
- 2) Aparatur;
- 3) Modal.

c. Pengeluaran Transfer :

- 1) Angsuran dan Bunga;
- 2) Bantuan;
- 3) Dana Perimbangan;
- 4) Dana Cadangan.

d. Pengeluaran Tidak Terduga.

3. Efektivitas Penerimaan Dan Pemanfaatan Pendapatan Asli Daerah

Efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Kegiatan operasional dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan. Untuk mengetahui efektivitas penerimaan PAD Kabupaten Jeneponto tahun 2014-2016 dapat dilihat dari efektivitas pengelolaan pajak dan retribusi

daerah karena pajak dan retribusi merupakan sumber PAD terbesar di Kabupaten Jeneponto.

Dari tiga tahun terakhir ini terus terjadi peningkatan pendapat asli daerah, ini membuktikan bahwa kemampuan pemerintah meningkatkan kemampuan penerimaannya dalam mengelolah kekayaan daerah dapat menjadikan pendapatan asli daerah sebagai pendapatan keuangan yang tinggi dalam menyelenggarakan pemerintahan yang kian terus meningkat dari tahun ke tahun dapat berjalan dengan baik.



BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang didasarkan pada analisis data, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

Sistem Akuntansi Penerimaan Dan Pemanfaatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jeneponto sudah efektif dalam penggunaan dana. Dari tiga tahun terakhir ini terus terjadi peningkatan pendapat asli daerah, ini membuktikan bahwa kemampuan pemerintah meningkatkan kemampuan penerimaannya dalam mengelola kekayaan daerah dapat menjadikan pendapatan asli daerah sebagai pendapatan keuangan yang tinggi dalam menyelenggarakan pemerintahan yang kian terus meningkat dari tahun ke tahun dapat berjalan dengan baik.

B. Saran

Saran yang dapat diberikan dari penelitian ini:

1. Pihak DPPKAD Kabupaten Jeneponto sebaiknya memperhatikan lebih rinci pelaksanaan pengendalian intern pada bagian akuntansi agar lebih memperhatikan prosedur pembukuan dalam pencatatan penerimaan PAD.
2. Pelaksanaan pengendalian intern di bidang akuntansi harus melaksanakan proses penjurnalan atas penerimaan PAD untuk menghindari kesalahan baik salah catat atau tidak dicatatnya suatu penerimaan serta memperbanyak pengadaan sosialisasi dan kegiatan bimbingan teknis bagi para pegawai khususnya di bidang akuntansi agar pelaksanaan sistem dan

prosedur akuntansi penerimaan serta pengendalian intern dapat menjadi lebih baik.

3. Menjadikan Permendagri No. 59 Tahun 2007, kebijakan daerah dan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum sebagai pelaksanaansistem akuntansi penerimaan dan pemanfaatan pendapatan Asli Daerah.



DAFTAR PUSTAKA

- Andriani Wiwik. 2010. Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Keterandalan dan Ketepatanwaktuan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada Pemerintah Daerah Kab. Pesisir Selatan). Dalam *Jurnal Akuntansi & Manajemen*, 5 (1): h: 69-80.
- Arfianti, Dita. 2011. Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Batang). *Skripsi* Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang.
- Halim, Abdul. 2013. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi Keempat. Salemba Empat, Jakarta.
- Halim, Restianto, Karman. 2010. *Sistem Akuntansi Sektor Publik*. UPP STIM YKPM, Yogyakarta.
- Karamoy, Rone. 2013. Evaluasi Pelaksanaan Sistem Dan Prosedur Penerimaan Kas Pada Dinas Pendapatan Kota Manado. Universitas Sam Ratulangi. Manado. *Jurnal EMBA*. Vol. 1 No. 3.(2013) <http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/1936/1533>. Diakses pada 7 November 2014 Hal.882-997.
- Kuncoro, Mudrajad. 2009. *Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi: Bagaimana Meneliti dan Menulis Tesis*. Erlangga, Jakarta.
- Mahmudi, 2011. *Akuntansi Sektor Publik*. Penerbit UII Press, Yogyakarta
- Puspita Sari, Noni dan IdharYahya. 2009. *Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendaptan Asli Daerah (PAD) terhadap belanja langsung*. Universitas Sumatera Utara, Medan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007. *Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang*

Pedoman Pengelolaan Keuangan Negara. Jakarta.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005. *Tentang Standard Akuntansi Pemerintahan.* Jakarta.

Republik Indonesia. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Siti Soimah. 2014 . Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada Kabupaten Bengkulu Utara). Dalam *Jurnal Akuntansi*, 6 (1): h: 18-61.

Safitri, NurulAisyiyah. 2008. *Analisis Kinerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Sebelum dan Sesudah Pemberlakuan Pemendagri Nomor 13 Tahun 2006 Studi Pada Pemerintah Kabupaten Kudus.* Skripsi Sarjana (Tidak dipublikasikan). Fakultas Ekonomi UNDIP: Semarang.

Tuerah, Fretty Sofia. 2013. Evaluasi Pelaksanaan Sistem dan Prosedur Penerimaan dan Pengeluaran Kas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Minahasa Tenggara. Universitas San Raulangi. Manado. *Jurnal EMBA*. Vol. 1 No. 3. (2013) <http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/1936/1533>. Diakses pada 10 November 2014 Hal. 365-475.





**TARGET PENERIMAAN PENDAPATAN ASLI DARI DAERAH DARI
TAHUN 2014-2016**

No	Tahun	Target Penerimaan PAD
1	2014	21.680.093.000,00
2	2015	20.474.666.8000,00
3	2016	16.285.472.2000,00

REALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH DARI TAHUN 2014-2016

No	Uraian	Tahun realisasi		
		2014	2015	2016
	Pendapatan Asli Daerah	21.680.093.000,00	45.690.837.809,00	64.000.145.600,00
1	Pajak Daerah	3.314.000.000,00	8.728.179.053,00	11.581.200.360,00
2	Retribusi Daerah	5.606.593.000,00	26.681.827.012,00	37.475.145.600,00
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	3.634.000.000,00	4.208.140.399,00	5.034.000.000,00
4	Lain-lain PAD Yang Sah	9.125.500.000,00	6.407.144.145,00	9.909.799.640,00

**RINCIAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN JENEPONTO
TAHUN 2014-20116**

Pendapatan Asli Daerah	Tahun Realisasi		
	2014	2015	2016
Hasil Pajak Daerah	3.314.000.000,00	8.728.179.053,00	11.581.200.360,00
Hotel bintang dua	13,540,800,00	25.870.053,00	12,500,000,00
Wisma Pariwisata	-	-	12,500,000,00
Rumah makan	19,290,300,00	23.260.000,00	15,000,000,00
Pagelaran Kesenian /Tari/music/busana			5,000,000,00
Reklame Papan /Bill Board/Videotron /megatron	147,680,544,00	177.463.670,00	270,000,000,00
Reklame kain	5,400,240,00	-	-
Pajak penerangan jalan PLN	1.313,975.134	4.856.683.804,00	4,700,000,000,00
Batu gunung/kali	130,920,560,00	212.302.823,25	175,000,000,00
Pasir ayak	-	-	18,750,000,00
Pasir urung/timbunan	9,860,500,00	8.735.489,50	22,500,000,00
Timbunan tanah	20,790,668,00	111.771.677,00	3,750,000,00
Batu Bata	15,379,664,00	19.654.520,00	11,250,000,00
Krikil sungai	5,998,215,00	1.697.413,25	41,250,000,00
Pasir pasangan	98,233,093,00	100.625.273,75	75,000,000,00
Pasir batu (sirtu)	46,932,626,00	54.553.883,75	52,500,000,00
Batu Pecah	10,798,254,00	14.554.889,50	
Pajak parker			25,000,000,00
Pajak Bea Perolehan Ha katas Tanah dan Bangunan	82,970,550,00	88.384.285,00	500,000,000,00
Pajak bumi dan bangunan	1,780,599,620	3.032.621.271,00	5,641,200,360,00
Hasil Retribusi Daerah	5.606.593.000,00	26.681.827.012,00	37.475.145.600,00
Retribusi pelayanan pasar	280,500,978,00	328.153.000,00	1,000,000,000,00
Retribusi pelayanan administrasi	-	-	-
Pelayanan Kesehatan	1,537,336.527,00	13.653.928.000,00	16,513,644,700,00
Pelayanan Kesehatan RSUD	2,508,346,881,00	11.356.777.612,00	19,040,519,111,00
Pelayanan Administrasi RSUD	2,220,490,00	3.799.000,00	-
Pelayanan Persampahan	22,150,220,00	20.875.000,00	140,000,000,00

Pendapatan Asli Daerah	Tahun Realisasi		
	2014	2015	2016
pemeriksaan alat pemadam kebakaran			5,000,000,00
penggantian biaya cetak peta			5,000,000,00
pelayanan parker ditepi jalan umum	57,000,500,00	70.570.400,00	150,000,000,00
pengujian kendaraan bermotor	24,250,330,00	31.781.000,00	50,000,000,00
pengendalian Menara telekomunikasi	20,500,420,00	15.000.000,00	150,000,000,00
kontribusi dana sosial & SHU	25,002,487,00	30.018.000,00	40,379,000,00
pelayanan administrasi pertambangan	-	-	-
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah/sewa rumah dinas	11,200,000,00	6.300.000,00	34,800,000,00
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah/ Sewa Gedung	18,500,000,00	10.438.500,00	-
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah/sewa Alat Berat	37,840,928,00	40.000.000,00	43,700,000,00
Retribusi Terminal	100,007,450,00	129.520.000,00	115,000,000,00
Retribusi Tempat Parkir Khusus	14,250,449,00	18.103.300,00	75,000,000,00
Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	9,801,502,00	10.494.000,00	20,000,000,00
Retribusi Penjualan Produksi Usaha daerah/hasil pertanian		5.150.000,00	17,250,000,00
Retribusi Pemakaian Kekayaan	28,220,500,00	10.430.000,00	100,000,000,00
Daerah (Sewa Gedung & Rumah Dinas)	-	-	-
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Sewa Aula)	25,100,440,00	30.000.000,00	50,000,000,00
Retribusi Penjualan Hasil Pertanian	12,989,778,00	11.500.000,00	17,250,000,00

Pendapatan Asli Daerah	Tahun Realisasi		
	2014	2015	2016
Retribusi Tempat rekreasi dan Olahraga	5,657,500,00	2.900.000,00	50,000,000,00
Retribusi Penjualan Bibit	-	-	20,000,000,00
Retribusi Rumah Potong Hewan	115,998,354,00	126.240.000,00	-
Retribusi Penjualan Produksi Usaha daerah /Perkebunan	32,005,249,00	33.660.000,00	-
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Perikanan)	10,000,000,00	10.000.000,00	50,000,000,00
Retribusi Tempat Pelelangan	2,800,650,00	-	-
Retribusi Penjualan Hasil Perikanan	-	-	10,000,000,00
Retribusi Garam	-	-	-
Retribusi Izin Usaha Pertambangan	-	-	-
Retribusi izin trayek	-	4.025.000,00	50,000,000,00
Retribusi izin mendirikan bangunan	324,909,957,00	252.349.200,00	2,828,249,826,00
Retribusi SITU/HO	349,598,445,00	469.215.000,00	391,590,000,00
Retribusi izin usaha perikanan	-	600.000,00	10,000,000,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	3.634.000.000,00	4.208.140.399,00	5.034,000,000,00
Bank Sul-Sel	3.634.000.000,00	4.208.140.399,00	5.000,000,000,00
PT. Itabel Alam Pulu	-	-	34,000,000,00
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	9.125.500.000,00	6.407.144.145,00	9.909.799.640,00
Hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan	2,193,827,200,00	173.810.400,00	2,620,000,000
Jasa kas daerah	2,569,524,900,00	2.645.065.571,00	2,000,000,000
Rekening deposito Bank Sulsel	1,399,150,995,00	1.251.071.055,00	2,000,000,000
Kerugian uang	1,370,059,287,00	1.577.189.347,00	1,099,799,640
Kerugian barang	100,500,980,00	-	50,000,000

Pendapatan Asli Daerah	Tahun Realisasi		
	2014	2015	2016
Pendapatan dari pengembalian	945,997,234,00	760.007.772,00	2,100,000,000
Pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran gaji dan tunjangan	90,787,387,00	129.398.521,00	100,000,000
Lain-lain PAD	459,652,026,00	630.609.251,00	2,000,000,000
Jumlah	21.680.093.000,00	45.690.837.809,00	64.000.145.600,00



**RINCIAN BELANJA MODAL PEMBANGUNAN
KABUPATEN JENEPONTO
TAHUN ANGGARAN 2014-2016**

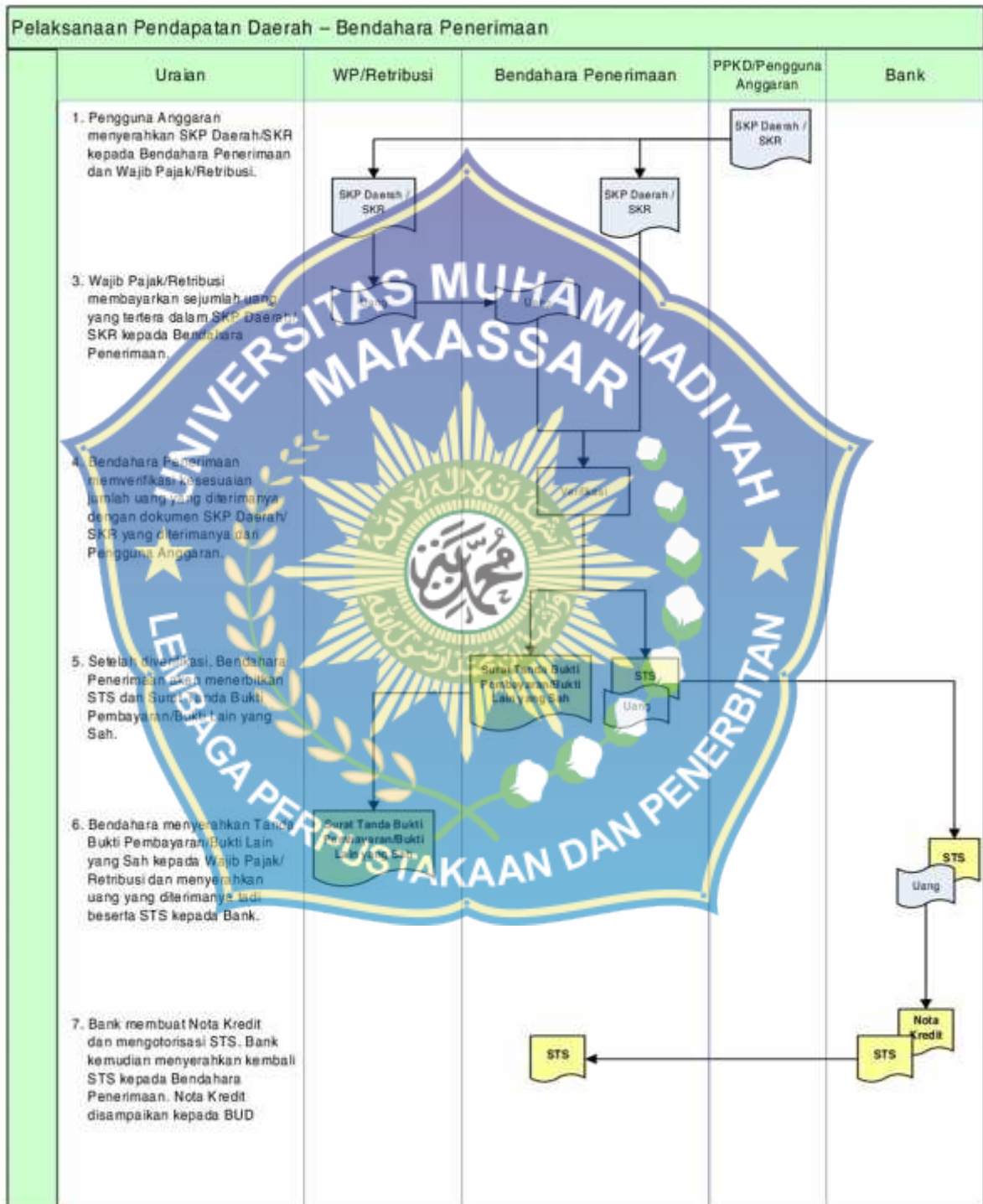
Uraian	2014	2015	2016
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	17,355,249,500	26,047,787,989	96,923,069,485
Belanja Modal Pengadaan Jalan Setapak	3,905,841,000	5,579,122,700	2,642,636,300
Belanja Modal Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan (rutin / periodic)	2,890,480,405	4,658,281,650	15,161,284,000
Belanja Modal Perintisan / Pembangunan Jalan	3,590,411,599	3,621,680,500	474,597,000
Belanja Modal Peningkatan Jalan	2,490,845,910	5,093,840,000	1,547,480,000
Belanja modal Pembangunan Bangunan Perlengkapan jalan		545,813,000	3,585,976,000
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi kanal Permukaan	5,948,746,834	7,334,859,692	7,751,490,500
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan			3,986,367,000
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan irigasi	6,894,284,550	4,528,530,545	34,596,579,424
Belanja modal Pengadaan Konstruksi jaringan air bersih / air minum	8,893,284,375	12,650,074,946	11,606,951,394
Belanja Modal sumur	3,459,023,415	5,527,162,676	2,561,194,163
Jumlah	50,114,162,383	75,773,900,335	178,459,615,903

**KONTRIBUSI PAD TERHADAP BELANJA PEMBANGUNAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2014 SAMPAI TAHUN 2016**

No	Tahun Anggaran	Belanja Pembangunan Daerah	PAD	Kontribusi
1	2013/2014	50,114,162,383	21.680.093.000	43,26%
2	2014/2015	75,773,900,335	46.025.290.609	60,74%
3	2015/2016	178,459,615,903	64.000.145.600	35,86%



FLOWCHART SISTEM AKUNTANSI PENERIMAAN PAD DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH KABUPATEN JENEPONTO



FLOWCHART SISTEM PEMANFAATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH



RIWAYAT HIDUP



Astuti Indriani, Lahir di Jeneponto Sulawesi Selatan pada tanggal 16 Agustus 1994. Penulis adalah anak pertama dari ketiga bersaudara buah hati dari Bapak Baso Bohari dan Ibu Marwiah. Penulis memulai memasuki jenjang pendidikan Sekolah Dasar di bangku SDI 197 Sepeka Kabupaten Jeneponto Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2000-2006.

Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan ke MTS Modern Mannilingi Bulu-Bulu Kabupaten Jeneponto tahun 2006-2009. Kemudian pada Tahun yang sama juga penulis melanjutkan pendidikan MA Modern Mannilingi Bulu-Bulu Kabupaten Jeneponto Tahun 2009-2012. Penulis melanjutkan pendidikan ke Universitas Muhammadiyah Makassar pada Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Jurusan Akuntansi Pada Tahun 2013.

Berkat pertolongan Allah SWT, perjuangan dan kerja keras yang disertai iringan doa dari kedua orang tua dan saudara, perjuangan panjang Penulis dalam mengikuti pendidikan di perguruan tinggi dapat berhasil dengan terkhususnya skripsi ini.